

**RENCANA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BNN Tahun 2024 disusun mengikuti kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja BNN melalui berbagai tahapan yakni; Penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja dan Pemutakhiran Renja. Berbagai tahapan ini untuk memastikan penyesuaian atau penelarasan Renja dengan berbagai perkembangan kebijakan pemerintah yang terjadi selama periode perencanaan, baik aspek struktur program dan kegiatan, kinerja, dan anggaran.

Isian dokumen Renja BNN Tahun 2024 telah dilakukan penelaahan atau pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas melalui pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting). Dengan demikian, dokumen Renja BNN merupakan hasil kesepakatan bersama terkait rencana kinerja program dan anggaran BNN Tahun 2024 yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BNN.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa dokumen Renja BNN ini bersifat adaptif dan dinamis, sehingga masih dapat dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran hingga akhir periode tahun pelaksanaan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 29 Desember 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. Martinus Hukom, S.I.K., M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2024 merupakan masa transisional dalam perjalanan politik dan arah pembangunan Bangsa Indonesia. Dimana pada tahun 2024 akan diselenggarakan hajatan demokrasi lima tahunan dengan sistem yang berbeda dengan periode sebelumnya yakni penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif secara serempak atau bersamaan. Selain itu, tahun 2024 juga merupakan masa transisi agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional dari periode 2020-2024 dan akan berlanjut ke periode 2025-2029.

Terkait agenda politik lima tahunan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemilu 2024 sekitar Rp 37,4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah instansi diantaranya KPU, Bawaslu, Kemdagri, dan Polri. Alokasi anggaran tersebut tentunya turut mempengaruhi struktur alokasi anggaran pada APBN dan dinamika alokasi anggaran pada sejumlah Kementerian/Lembaga termasuk anggaran BNN yang mengalami penurunan menjadi Rp 1.553.703.266.480 dibandingkan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.837.655.990.000.

Desain APBN Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai empat tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Arah agenda pembangunan tersebut juga harus menjadi rujukan seluruh instansi pemerintah dalam mendesain program dan kebijakan belanja instansi, mengingat APBN menjadi salah satu instrumen pembangunan perekonomian nasional.

Kendati sumber daya penanganan permasalahan narkoba pada Tahun 2024 khususnya alokasi anggaran BNN mengalami pengurangan, namun upaya penanganan permasalahan narkoba juga tetap harus mendapat perhatian

dilakukan dengan pendekatan yang tepat, salah satunya adalah pendekatan kolaboratif. Praktik pengelolaan program P4GN dengan pendekatan kolaboratif dengan pelibatan aktor-aktor pembangunan yang lain telah dilaksanakan BNN selama beberapa tahun ini. Model kolaboratif ini telah terbukti memberikan hasil nyata terkait penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Dimana pada tahun 2023, berdasarkan survey prevalensi nasional menunjukkan terjadinya penurunan angka prevalensi baik pada kategori satu tahun pakai atau kategori pernah pakai. Perkembangan data prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam 3 periode survey dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1

Prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019, 2021 dan 2023

Kategori	Angka Prevalensi		
	2019	2021	2023
Pernah Pakai	1,80	1,95	1,73
Setahun Pakai	2,40	2,47	2,20

Sumber: Survey Prevalensi BNN dan LIPI

Berdasarkan hasil strategi kolaborasi dalam pengelolaan program penanganan permasalahan narkoba tersebut, perlu terus dijaga dan dikembangkan strategi kolaboratif yang lebih intensif dan ekstensif dengan memperluas keterjangkauan para aktor yang lain.

Khusus pada tahun 2024 yang akan datang, berdasarkan kondisi keterbatasan sumber daya anggaran BNN, maka diperlukan langkah-langkah kolaboratif dan kerjasama yang semakin luas dengan berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanganan permasalahan narkoba, baik instansi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat (*civil society*). Kolaborasi dengan berbagai elemen yang diarahkan pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi pengguna narkoba, maupun

pemberantasan peredaran gelap narkoba dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumberdaya BNN yang masih dalam kondisi terbatas.

Salah satu bentuk program kolaboratif yang diinisiasi BNN adalah Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Melalui program ini upaya penanganan permasalahan narkoba dilakukan pada level atau struktur sosial masyarakat terkecil yang memiliki kecukupan sumber daya untuk melakukan perubahan tatanan masyarakat di wilayah desa/kelurahan. Sasaran program Desa Bersinar akan diupayakan secara maksimal dengan dukungan sumberdaya yang dimiliki BNN dan Pemerintah Desa, dimana pada tahun 2023 telah mendorong dan membentuk sebanyak 414 rintisan desa bersinar dan Tahun 2024 ditargetkan membentuk rintisan desa bersinar sebanyak desa.

BNN juga menginisiasi program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai instrument alternatif upaya pemulihan bagi penyalah guna narkoba, khususnya bagi kalangan coba pakai atau bagi masyarakat yang terpapar narkoba kategori ringan. IBM ini telah dibentuk dan dikembangkan diberbagai wilayah untuk memfasilitasi upaya penanganan dini dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam upaya pemulihan. Pada tahun 2023 telah dibentuk sebanyak 414 unit dan pada tahun 2024 direncanakan meningkat menjadi unit. Peningkatan pembentukan unit IBM ini sebagai respon positif dan dukungan masyarakat akan kebutuhan IBM sebagai sarana penanganan dini bagi pihak yang terpapar narkoba di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Dalam upaya penindakan hukum pelaku peredaran gelap narkoba, BNN terus berupa memperkuat jalinan dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri sekaligus meningkatkan kapasitas pemberantasan BNN dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan kelengkapan sarana operasional yang modern dan canggih. Hal ini mutlak dilakukan di tengah perkembangan teknologi yang selalu berkembang dan semakin canggih sehingga sindikat jaringan narkoba juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung aktivitas pendistribusian dan pemasaran narkoba.

Terkait penguatan kapasitas kelembagaan BNN, berbagai upaya peningkatan terus dilakukan baik terkait aspek peningkatan sarana prasarana, kapasitas dan manajemen SDM, penguatan tata kelola kinerja dan organisasi, peningkatan akuntabilitas, sistem manajemen administrasi kearsipan, manajemen asset, dan peningkatan pelayanan publik. Upaya-upaya perbaikan tersebut dalam rangka mewujudkan organisasi BNN yang profesional, tangguh dan terpercaya.

Berbagai perbaikan tersebut selaras dengan sasaran agenda reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2022 telah memperoleh nilai RB sebesar 75,92 yang mengalami peningkatan dibandingkan nilai RB pada tahun 2021 yakni sebesar 75,38. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi BNN telah mampu mendorong perbaikan nyata terutama di tingkat unit kerja meskipun belum optimal. Hal ini dikarenakan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi, mulai perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi masih terfokus di tingkat pusat dan belum menyeluruh pada seluruh unit kerja vertikal. Hal yang sama juga terjadi pada akuntabilitas kinerja BNN, dimana pada tahun 2022 memperoleh nilai AKIP sebesar 68,53, yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang nilai AKIP sebesar 65,32.

Capaian yang sudah cukup baik terjadi pada aspek manajemen kearsipan, manajemen asset, dan kualitas laporan keuangan. Khusus terkait laporan keuangan, BNN berhasil memperoleh predikat WTP selama 8 tahun berturut. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pengelolaan administrasi keuangan BNN sudah akuntabel.

Hal penting lainnya dan perlu menjadi perhatian seluruh jajaran BNN adalah internalisasi dan pengelolaan agenda reformasi birokrasi yang perlu menjadi *mainstreaming* dan spirit bersama mewujudkan pembaharuan tata kelola organisasi BNN yang menjadi lebih baik dan mampu membangkitkan semangat memiliki dan menjaga organisasi pada seluruh pegawai.

Sementara agenda Reformasi Birokrasi di BNN selama ini masih sebatas atau masih focus pada upaya pemenuhan kebutuhan data dukung dokumen RB

atau masih bersifat prosedural, belum sampai tahapan substansi atau perubahan-perubahan manajemen organisasi yang lebih agile dan adaptif serta berbasis kinerja.

Perubahan paradigmatik terkait pengelolaan reformasi birokrasi inilah yang perlu dikembangkan di lingkungan BNN, sehingga perubahan-perubahan manajemen organisasi dapat terlaksana dengan baik dan memberikan perubahan nyata dan manfaat bagi seluruh aparatur sehingga seluruh jajaran memiliki kebanggaan dengan organisasi BNN.

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- 7) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- 8) Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
- 9) Surat Edaran Bersama antara Kemenkeu dan Bappenas dengan Nomor S-122/MK.02/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN FOKUS PRIORITAS

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNN

Rencana Kerja BNN Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari seluruh agenda rencana pembangunan nasional, sehingga arah kebijakan, strategi dan fokus program kerja BNN juga harus selaras dengan rencana pembangunan nasional. Pada Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024, Pemerintah mengusung tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema ini menjadi inspirasi atau rujukan seluruh kementerian/lembaga dalam mendesain fokus rencana program kerja Tahun 2024.

Dalam penyusunan agenda rencana program kerja BNN Tahun 2024 dilakukan berbagai penyesuaian dengan sejumlah dokumen-dokumen perencanaan terkait, diantaranya adalah dokumen rencana strategis BNN 2020-2024. Dalam rencana strategis BNN 2020-2024 dirumuskan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pengawasan Titik Masuk Jalur Peredaran dan Kapasitas Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika. Strateginya melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan serta peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika. Strateginya melalui peningkatan kerjasama instansional dalam negeri dan luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- 3) Peningkatan Pemberdayaan, Partisipasi dan Kedayatanggapan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Nilai-nilai Kearifan dan Kelembagaan Lokal Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Strateginya melalui reformasi manajemen diseminasi dan

- advokasi publik untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika; dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- 4) Penguatan Dukungan Fasilitasi yang mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan. Strateginya melalui Peningkatan Akses Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
 - 5) Penguatan Kerjasama, Inovasi dan Teknologi. Strateginya melalui pengembangan jaringan arsitektur kinerja; dan penguatan penelitian di bidang P4GN.
 - 6) Penataan dan Penguatan Kelembagaan BNN (Tata Kelola Untuk Pelayanan Publik). Strateginya melalui pemanfaatan jaringan kerja dan proses bisnis kelembagaan BNN yang didukung dengan kualitas regulasi, profesionalisme ASN dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

B. FOKUS PRIORITAS RENCANA PROGRAM KERJA 2023

Penanggulangan permasalahan narkoba dalam desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 masuk dalam kluster Prioritas Nasional yang ke-7 yakni "Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik" dan dikelompokkan dalam kegiatan prioritas "Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", selanjutnya dijabarkan menjadi 2 proyek prioritas yakni;

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam pengidentifikasian skala prioritas rencana program kerja dan pengalokasian kebutuhan pendanaan, BNN menyusun skala prioritas dalam empat tingkatan berdasarkan tingkat urgensi atau kebutuhan. Empat skala prioritas tersebut adalah:

1. Prioritas Operasional Rutin; Pendanaan kebutuhan sehari-hari lembaga untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran.
2. Prioritas Proyek Prioritas Nasional; Pendanaan untuk memenuhi klaster output proyek prioritas nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
3. Prioritas Lembaga; Pendanaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak organisasi yang mendukung fokus Rencana Kerja BNN namun belum teralokasi dalam klaster proyek prioritas nasional atau terkait tugas khusus dari Kepala BNN.
4. Prioritas Unit Kerja; Pendanaan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja atau sebagai output regular unit kerja.

Berdasarkan ketersediaan sumberdaya anggaran pemerintah, pada Tahun 2024 BNN memfokuskan pada sejumlah hal penting yang terkait dengan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas BNN dalam merespon perkembangan ekologi kejahatan narkoba yang terus bermutasi. Fokus prioritas BNN tersebut adalah:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemberantasan peredaran gelap narkotika, melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan bagi Penyidik BNN;
 - b. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba di pintu-pintu masuk barang dan orang, melalui optimalisasi pos-pos interdiksi terpadu lintas kementerian/lembaga
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

- a. Penguatan ketahanan komunal masyarakat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar) dimulai dari/berbasis wilayah desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan upaya pemulihan kawasan rawan narkoba secara lintas program;
 - b. Peningkatan layanan rehabilitasi penyalah guna/pecandu narkoba, melalui penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan milik masyarakat;
 - c. Penguatan sinergi lintas program dan lintas sektor, melalui perluasan hubungan koordinasi dan kolaborasi stakeholder dalam jaringan arsitektur kinerja P4GN;
3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan
- a. Penguatan dukungan/kepercayaan masyarakat terhadap program P4GN, dengan memaksimalkan pengelolaan media komunikasi publik (sosial media) sebagai sarana pembangunan opini positif publik terhadap kiprah nyata atau berbagai capaian kinerja BNN;
 - b. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang Holistik-Integratif di lingkungan BNN.

Dalam proyek prioritas nasional BNN Tahun 2024 terdapat 15 output proyek prioritas nasional baik yang menjadi output dari Proyek Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba maupun Output dari Proyek Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. Informasi output proyek prioritas BNN Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada lampiran I.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Alokasi anggaran BNN sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan tentang Pagu Alokasi Anggaran BNN Tahun 2023 berdasarkan hasil rapat Pembahasan panitia kerja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024 ditetapkan sebesar **Rp 1.553.703.266.480**. Anggaran tersebut terdistribusi untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program di BNN yakni;

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebesar **Rp 284.515.735.480 (18,3%)**
2. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp 1.269.187.531.000 (81,7%)**.

Berdasarkan kebutuhan jenis belanja, anggaran BNN dapat dipetakan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Operasional	Non Operasional	Total	%
1	Belanja Pegawai	668.171.744.000	-	668.171.744.000	43,0%
2	Belanja Barang	415.732.749.000	438.225.226.480	853.957.975.480	55,0%
3	Belanja Modal	-	31.573.547.000	31.573.547.000	2,0%
Jumlah		1.083.904.493.000	469.798.773.480	1.553.703.266.480	100,0%
%		69,8%	30,2%	100,0%	

Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke seluruh unit kerja atau satuan kerja BNN baik pada tingkat pusat dan daerah untuk menyelenggarakan berbagai program kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi BNN yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi penyalah guna narkoba, pemberantasan, hukum dan kerjasama, kesekretariatan, pengawasan internal, pengelolaan data dan informasi, Laboratorium Uji Narkoba, Diklat Aparatur. Adapun proporsi bobot alokasi anggaran pada setiap fungsi di BNN sebagai berikut:

No	Fungsi	Anggaran	%
1	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	51.707.394.000	3,33%
2	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	56.971.924.000	3,67%
3	Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba	75.258.665.480	4,84%
4	Pemberantasan Kejahatan Narkoba	89.558.415.000	5,76%
5	Hukum dan Kerjasama	7.093.570.000	0,46%
6	Kesekretariatan Lembaga	1.256.094.896.000	80,85%
7	Pengawasan Internal	4.944.789.000	0,32%
8	Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi P4GN	3.126.624.000	0,20%
9	Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	3.925.767.000	0,25%
10	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BNN	5.021.222.000	0,32%
JUMLAH		1.553.703.266.480	100%

Anggaran BNN Tahun 2024 dialokasikan untuk membiayai berbagai rencana kinerja program kegiatan. Adapun informasi alokasi anggaran dan rencana kinerja program kegiatan BNN Tahun 2024 secara lengkap sebagaimana dalam lampiran II dan III.

Dari keseluruhan anggaran BNN Tahun 2024, diantaranya untuk alokasi anggaran proyek prioritas nasional sebanyak **Rp 146.845.291.000** atau sekitar **9,5 %** dari keseluruhan anggaran BNN. Anggaran proyek prirotas nasional tersebut untuk 17 output, baik pada fungsi pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. Terkait pelaksanaan manajemen kinerja dan penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, BNN mengadaptasi kebijakan tersebut dan terus memperbaikinya dalam struktur perencanaan dan penganggaran Tahun 2024. Rumusan RO di lingkungan BNN telah disesuaikan dengan karakteristik hasil akhir yang bersifat spesifik dari masing-masing pelaksanaan berbagai tahapan kegiatan. Informasi Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output BNN Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran IV.

Mengenai pengalokasian anggaran BNN berdasarkan fungsi pada seluruh unit kerja baik pusat dan unit kerja vertikal sebagai berikut:

No	Fungsi	Anggaran		
		Unit Kerja Pusat	Unit Kerja Vertikal	Total
1	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	10.128.107.000	41.579.287.000	51.707.394.000
2	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	9.412.609.000	47.559.315.000	56.971.924.000
3	Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba	18.269.045.000	56.989.620.480	75.258.665.480
4	Pemberantasan Kejahatan Narkoba	56.065.118.000	33.493.297.000	89.558.415.000
5	Hukum dan Kerjasama	7.093.570.000	-	7.093.570.000
6	Kesekretariatan Lembaga	630.526.994.000	625.567.902.000	1.256.094.896.000
7	Pengawasan Internal	4.944.789.000	-	4.944.789.000
8	Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi P4GN	3.126.624.000	-	3.126.624.000
9	Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	3.925.767.000		3.925.767.000
10	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BNN	5.021.222.000	-	5.021.222.000
JUMLAH		748.513.845.000	805.189.421.480	1.553.703.266.480
%		48,18%	51,82%	100,00%

Secara lebih detil sebaran alokasi anggaran pada masing-masing unit kerja baik pusat dan unit kerja vertikal BNNP/BNNK pada Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada lampiran V.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja BNN Tahun 2024 ini sebagai gambaran informasi seluruh program kerja dan pengalokasian anggaran beserta rencana kinerja yang ditargetkan oleh seluruh unit penanggung jawab kinerja. Dokumen Rencana Kerja BNN Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang menyajikan tahap akhir dari periode perencanaan tahun 2020-2024. Dengan demikian, rencana kerja yang disajikan dalam dokumen ini merupakan upaya akhir yang harus dilaksanakan secara maksimal oleh BNN dalam rangka mengejar beberapa target kinerja yang belum tercapai atau hal-hal yang masih kurang pada periode-periode sebelumnya.

Terkait dengan sajian informasi rencana kinerja dalam dokumen rencana kerja BNN Tahun 2024 ini, dapat juga disebut sebagai dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tingkat lembaga yang sekaligus menjadi rujukan atau dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan seluruh unit organisasi di lingkungan BNN baik tingkat eselon I, eselon II unit kerja tingkat pusat, unit kerja mandiri, dan unit kerja vertikal BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I:

Daftar Proyek Prioritas Nasional BNN Tahun 2024

Lampiran II:

Rencana Kinerja Program dan Kegiatan BNN Tahun 2024

Lampiran III:

Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024

Lampiran IV:

Daftar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan Tahun 2024

Lampiran V:

Alokasi Anggaran Unit Kerja Pusat, BNNP dan BNNK Tahun 2024

LAMPIRAN I
DAFTAR PROYEK PRIORITAS NASIONAL BNN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO PRIORITAS	TARGET	SATUAN	PAGU	UNIT PELAKSANA
	Program Dukungan Manajemen				
1	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 001 Sarana Laboratorium Narkoba Daerah	1	Unit	25.000.000	Pus. Laboratorium
2	3247 Penyelenggaraan Advokasi QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga 002 Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba UBB Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa 001 Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	1.040 418	Keluarga Desa	8.570.000 14.049.287	Dit Advokasi Dit Advokasi
3	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga 001 Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	414	Lembaga	43.541.500	Dit. PSM
4	3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 001 Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	16	Pok Masyarakat	4.743.500	Dit. Dayatif
5	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah PDG Standarisasi Profesi dan SDM 001 Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi 002 Petugas Pembinaan Agen Pemulihan yang Terlatih	2.070 207	Orang Orang	3.255.097 3.877.523	Dit. PLRIP Dit. PLRIP
6	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat PDD Standarisasi Lembaga 001 Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Stadar Pelayanan Minimal (SPM) QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga 001 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional 002 Fasilitas Pembina Unit IBM	40 414 207	Lembaga Lembaga Lembaga	3.300.000 11.639.350 4.119.034	Dit. PLRIP Dit. PLRIP Dit. PLRIP
7	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba RAB Sarana Bidang Kesehatan 004 Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi	1	Unit	1.000.000	Dit. Pascarehab
8	5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika QHB Operasi Bidang Keamanan 001 Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika 002 Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	6 5	Operasi Operasi	3.500.000 1.000.000	Dit. Narkotika Dit. Narkotika

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO PRIORITAS	TARGET	SATUAN	PAGU	UNIT PELAKSANA
9	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga 001 SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat 001 Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	70	Lembaga	6.400.000	Dit. I & E
		1.730	Orang	12.850.000	Dit. I & E
Total Anggaran Proyek Prioritas Nasional				146.845.291	

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN 2024

KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	56,39	Kepala BNN
2	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	81	Kepala BNN
066.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	80	Settama
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	84	
		Opini Kepercayaan Publik Terhadap BNN	85	
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan menuju WBK/WBBM	15	Ittama
		Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	4	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			Biro Keuangan
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur	Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja	100	
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			Biro SDMA Ortala
	Meningkatnya Pengelolaan SDM, Organisasi dan Tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian (skala 4)	3,5	
		Persentase Penilaian atas Efektivitas Penataan Tatalaksana	86	
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN			Biro Perencanaan
	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93	
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana			Biro Umum
	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3,3	
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	3,3	

KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja			
	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja serta Pengawasan, Penegakan Disiplin, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100	Inspektorat I
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 pada wilayah Pengawasan I	5	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal pada wilayah Pengawasan I	B	
		Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100	Inspektorat II
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 pada wilayah Pengawasan II	5	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal pada wilayah Pengawasan II	B	
		Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100	Inspektorat III
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 pada wilayah Pengawasan III	5	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal pada wilayah Pengawasan III	B	
		Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100	Inspektorat Pengawasan Khusus
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	
Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan		B		
3242	Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN			
	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	2,5	Puslitdatin
		Indek kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	3,5	
3244	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan			
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Presentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	25	PPSDM
		Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN	3,8	

KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan			Biro Humpro
	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan	3,65	
		Presentase Tingkat Kepuasan Layanan Protokoler	80	
066.BL	PROGRAM P4GN			
1	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	Dep. Bidang Pencegahan
2	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	150	Dep. Bidang Dayamas
3	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutam	3,54	Dep. Bidang Rehabilitasi
		Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65	
4	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	35	Dep. Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	100	
5	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4	Dep. Bidang Huker
		Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100	
3247	Penyelenggaraan Advokasi			Dit. Advokasi
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,7	
3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif			Dit Dayatif
	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari 'Bahaya/Waspada' menjadi 'Waspada/Siaga/Aman'	209	
3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum			Dit. Hukum
	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4	
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	
3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi			Dit. Intelijen
	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	30	

KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat			Dit. Interdiksi
	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	58	
3253	Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri			Dit. Kerjasama
	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100	
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba			Dit. Pascarehabilitasi
	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase peningkatan kualitas hidup klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan	62	
	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kapabilitas rehabilitasi	3,4	
		Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,4	
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat			Dit. PSM
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,25	
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti			Dit. Wastahti
	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah			Dit. PLRIP
	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	100	
		Petugas Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terlatih	2070	
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat			Dit. PLRKM
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	207	
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	414	
3261	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran			Dit. Dakjar
	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100	
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100	
3262	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor			Dit. PP
	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	5	
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	100	
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	10	

KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba			Balai/Loka Rehabilitasi
	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	3,2	
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika			Dit. Narkotika
	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	400	
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	11	
5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika			Dit. TPPU
	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P1	30	
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi			Dit. Informasi Edukasi
	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,51	
6239	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika			Pusat Laboratorium Uji Narkoba
	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	86	
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	
		Jumlah metode pengujian baru	2	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang ter publikasi	2	

LAMPIRAN III
ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN			%		
		RM	PNBP	TOTAL			
066	Badan Narkotika Nasional	1.539.062.404.480	14.640.865.000	1.553.703.269.480	100,0%		
A	066.01	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		269.874.873.480	14.640.865.000	284.515.738.480	18,3%
1	3247	Penyelenggaraan Advokasi	27.224.090.000	-	27.224.090.000	1,8%	
2	3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	9.278.992.000	-	9.278.992.000	0,6%	
3	3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	3.000.288.000	-	3.000.288.000	0,2%	
4	3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	13.254.609.000	-	13.254.609.000	0,9%	
5	3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	10.315.536.000	-	10.315.536.000	0,7%	
6	3253	Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri	4.093.282.000	-	4.093.282.000	0,3%	
7	3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	6.336.698.000	-	6.336.698.000	0,4%	
8	3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	47.692.932.000	-	47.692.932.000	3,1%	
9	3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	10.319.614.000	-	10.319.614.000	0,7%	
10	3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	10.589.027.000	-	10.589.027.000	0,7%	
11	3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	29.608.789.480	14.409.960.000	44.018.749.480	2,8%	
12	3261	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	10.283.569.000	-	10.283.569.000	0,7%	
13	3262	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	3.891.146.000	88.897.000	3.980.043.000	0,3%	
14	4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	14.270.050.000	44.144.000	14.314.194.000	0,9%	
15	5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	30.840.043.000	-	30.840.043.000	2,0%	
16	5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	10.565.001.000	-	10.565.001.000	0,7%	
17	5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	24.483.304.000	-	24.483.304.000	1,6%	
18	6239	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	3.827.903.000	97.864.000	3.925.767.000	0,3%	
B	066.01.	Program Dukungan Manajemen		1.269.187.531.000	-	1.269.187.531.000	81,7%
1	3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	700.263.779.000	-	700.263.779.000	45,1%	
2	3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	13.240.292.000	-	13.240.292.000	0,9%	
3	3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	12.213.314.000	-	12.213.314.000	0,8%	
4	3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	520.806.833.000	-	520.806.833.000	33,5%	
5	3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	4.944.789.000	-	4.944.789.000	0,3%	
6	3242	Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	3.126.624.000	-	3.126.624.000	0,2%	
7	3244	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	5.021.222.000	-	5.021.222.000	0,3%	
8	3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	9.570.678.000	-	9.570.678.000	0,6%	

LAMPIRAN IV
DAFTAR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) KEGIATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
BADAN NARKOTIKA NASIONAL		1.553.703.266.480	
	066.01.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	-	284.515.735.480
1	3247 Penyelenggaraan Advokasi	-	27.224.090.000
	3247.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4.604.803.000	-
	3247.AFA.001 Petunjuk Teknis Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	2.054.029.000	-
	3247.AFA.002 Petunjuk Teknis Advokasi Program Ketahanan Keluarga anti Narkoba Berbasis Sumber daya Pembangunan Desa	2.550.774.000	-
	3247.QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	8.570.000.000	-
	3247.QDE.002 Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	8.570.000.000	-
	3247.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	14.049.287.000	-
	3247.UBB.001 Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	14.049.287.000	-
2	3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	-	9.278.992.000
	3248.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.000.000.000	-
	3248.AFA.001 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat pada Kawasan Rawan Narkoba	1.000.000.000	-
	3248.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.535.492.000	-
	3248.BDD.001 Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	3.535.492.000	-
	3248.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.743.500.000	-
	3248.QDD.001 Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	4.743.500.000	-
3	3250 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	-	3.000.288.000
	3250.AAA Undang-Undang	176.630.000	-
	3250.AAA.002 Tindak Lanjut Undang-Undang Narkotika	176.630.000	-
	3250.AAH Peraturan lainnya	1.381.168.000	-
	3250.AAH.001 Peraturan Badan Narkotika Nasional	989.248.000	-
	3250.AAH.002 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	391.920.000	-
	3250.BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	412.669.000	-
	3250.BBA.001 Layanan Bantuan Hukum P4GN Perseorangan	412.669.000	-
	3250.BBB Layanan Bantuan Hukum Lembaga	846.825.000	-
	3250.BBB.001 Layanan Bantuan Hukum P4GN Lembaga	846.825.000	-
	3250.BBC Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	80.436.000	-
	3250.BBC.001 Layanan Bantuan Hukum P4GN Kelompok Masyarakat	80.436.000	-
	3250.BMA Data dan Informasi Publik	102.560.000	-
	3250.BMA.001 Layanan JDIH BNN	102.560.000	-
4	3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	-	13.254.609.000
	3251.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	13.254.609.000	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	<i>3251.BKA.001 Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</i>	9.654.609.000	-
	<i>3251.BKA.002 Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)</i>	3.600.000.000	-
5	3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	-	10.315.536.000
	3252.BCA Perkara Hukum Perseorangan	10.315.536.000	-
	<i>3252.BCA.001 Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia</i>	10.315.536.000	-
6	3253 Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri	-	4.093.282.000
	3253.AEA Koordinasi	1.062.895.000	-
	<i>3253.AEA.001 Pembinaan Teknis Kerja Sama Bidang P4GN</i>	257.712.000	-
	<i>3253.AEA.002 Asistensi Kerjasama Bidang P4GN</i>	139.782.000	-
	<i>3253.AEA.003 Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang P4GN</i>	665.401.000	-
	3253.AEC Kerja sama	2.116.211.000	-
	<i>3253.AEC.001 Kerja Sama Luar Negeri Bidang P4GN</i>	2.116.211.000	-
	3253.AED Perjanjian	914.176.000	-
	<i>3253.AED.001 Perjanjian Kerja Sama Bidang P4GN</i>	914.176.000	-
7	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	-	6.336.698.000
	3256.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	1.952.399.000	-
	<i>3256.ABG.001 Kapabilitas Layanan Rehabilitasi</i>	571.842.000	-
	<i>3256.ABG.002 Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi</i>	604.925.000	-
	<i>3256.ABG.003 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi</i>	413.060.000	-
	<i>3256.ABG.004 Koordinasi Program Rehabilitasi Berkelanjutan</i>	362.572.000	-
	3256.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	255.771.000	-
	<i>3256.AFA.001 NSPK Pascarehabilitasi</i>	255.771.000	-
	3256.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	3.128.528.000	-
	<i>3256.BAA.001 Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan</i>	3.128.528.000	-
	3256.RAB Sarana Bidang Kesehatan	1.000.000.000	-
	<i>3256.RAB.004 Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi</i>	1.000.000.000	-
8	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	-	47.692.932.000
	3257.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4.151.432.000	-
	<i>3257.AFA.001 Petunjuk Pelaksanaan KOTAN</i>	4.151.432.000	-
	3257.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	43.541.500.000	-
	<i>3257.QDB.001 Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba</i>	43.541.500.000	-
9	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	-	10.319.614.000
	3258.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	3.765.436.000	-
	<i>3258.BAA.001 Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika</i>	47.849.000	-
	<i>3258.BAA.002 Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)</i>	3.717.587.000	-
	3258.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.471.692.000	-
	<i>3258.BIA.001 Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika</i>	1.545.031.000	-
	<i>3258.BIA.002 Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika (unit Vertikal)</i>	926.661.000	-
	3258.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	4.082.486.000	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	<i>3258.BIB.001 Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU</i>	<i>1.009.349.000</i>	-
	<i>3258.BIB.002 Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)</i>	<i>3.073.137.000</i>	-
10	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	-	10.589.027.000
	<i>3259.ADI Sertifikasi Profesi dan SDM</i>	<i>3.338.377.000</i>	-
	<i>3259.ADI.001 Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis</i>	<i>2.724.650.000</i>	-
	<i>3259.ADI.002 Tenaga Fasilitator Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kemampuan Teknis</i>	<i>613.727.000</i>	-
	<i>3259.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</i>	<i>118.030.000</i>	-
	<i>3259.AFA.001 Modul Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi</i>	<i>118.030.000</i>	-
	<i>3259.PDG Standarisasi Profesi dan SDM</i>	<i>7.132.620.000</i>	-
	<i>3259.PDG.001 Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi</i>	<i>3.255.097.000</i>	-
	<i>3259.PDG.002 Petugas Pembina Agen Pemulihan yang Terlatih</i>	<i>3.877.523.000</i>	-
11	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	-	44.018.746.480
	<i>3260.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat</i>	<i>23.083.429.000</i>	-
	<i>3260.BAA.001 Layanan Rehabilitasi di BNN</i>	<i>307.095.000</i>	-
	<i>3260.BAA.002 Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota</i>	<i>8.366.374.000</i>	-
	<i>3260.BAA.003 Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)</i>	<i>14.338.760.000</i>	-
	<i>3260.BAA.004 Layanan pemeriksaan psikologi tipe-A</i>	<i>63.080.000</i>	-
	<i>3260.BAA.005 Layanan pemeriksaan psikologi Tipe-B</i>	<i>8.120.000</i>	-
	<i>3260.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>	<i>1.876.933.480</i>	-
	<i>3260.BDB.001 Lembaga Rehabilitasi yang Operasional</i>	<i>1.876.933.480</i>	-
	<i>3260.PDD Standarisasi Lembaga</i>	<i>3.300.000.000</i>	-
	<i>3260.PDD.001 Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal</i>	<i>3.300.000.000</i>	-
	<i>3260.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>	<i>15.758.384.000</i>	-
	<i>3260.QDB.001 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional</i>	<i>11.639.350.000</i>	-
	<i>3260.QDB.002 Fasilitas Pembina Unit IBM</i>	<i>4.119.034.000</i>	-
12	3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	-	10.283.569.000
	<i>3261.BHB Operasi Bidang Keamanan</i>	<i>10.283.569.000</i>	-
	<i>3261.BHB.001 Operasi Penangkapan DPO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU</i>	<i>4.575.000.000</i>	-
	<i>3261.BHB.002 Operasi Penangkapan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU</i>	<i>5.708.569.000</i>	-
13	3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	-	3.980.043.000
	<i>3262.BCA Perkara Hukum Perseorangan</i>	<i>2.659.876.000</i>	-
	<i>3262.BCA.001 Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika</i>	<i>2.659.876.000</i>	-
	<i>3262.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat</i>	<i>1.157.200.000</i>	-
	<i>3262.BKA.001 Laporan Hasil Penyelidikan penyalahgunaan Psikotropika</i>	<i>1.157.200.000</i>	-
	<i>3262.BKC Pemantauan lembaga</i>	<i>162.967.000</i>	-
	<i>3262.BKC.001 Laporan hasil pengawasan Importir dan pengguna akhir prekursor narkotika</i>	<i>162.967.000</i>	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
14	4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	-	14.314.194.000
	4020.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	14.314.194.000	-
	4020.BAA.019 Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Penelitian di Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi	44.144.000	-
	4020.BAA.U01 Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	428.839.000	-
	4020.BAA.U02 Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	4.414.545.000	-
	4020.BAA.U03 Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1.620.061.000	-
	4020.BAA.U05 Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1.285.620.000	-
	4020.BAA.U06 Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	975.660.000	-
	4020.BAA.U08 Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1.158.974.000	-
	4020.BAA.U09 Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	1.125.936.000	-
	4020.BAA.U11 Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	580.594.000	-
	4020.BAA.U12 Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	733.136.000	-
	4020.BAA.U14 Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	568.870.000	-
	4020.BAA.U15 Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	468.555.000	-
	4020.BAA.U17 Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	369.040.000	-
	4020.BAA.U18 Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	540.220.000	-
15	5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	-	30.840.043.000
	5354.BCA Perkara Hukum Perseorangan	26.340.043.000	-
	5354.BCA.001 Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	6.634.131.000	-
	5354.BCA.002 Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	19.705.912.000	-
	5354.QHB Operasi Bidang Keamanan	4.500.000.000	-
	5354.QHB.001 Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	3.500.000.000	-
	5354.QHB.002 Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	1.000.000.000	-
16	5355 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-	10.565.001.000
	5355.BCA Perkara Hukum Perseorangan	10.565.001.000	-
	5355.BCA.001 Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	9.095.001.000	-
	5355.BCA.002 Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Ditangani BNPP	1.470.000.000	-
17	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	-	24.483.304.000
	5936.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5.233.304.000	-
	5936.AFA.001 Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Edukasi	5.100.044.000	-
	5936.AFA.002 Modul Edukasi Anti Narkoba	133.260.000	-
	5936.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6.400.000.000	-
	5936.QDB.001 SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	6.400.000.000	-
	5936.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	12.850.000.000	-
	5936.QDC.001 Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	12.850.000.000	-
18	6239 Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	-	3.925.767.000
	6239.ADD Standarisasi Lembaga	582.103.000	-
	6239.ADD.001 Layanan Mutu Laboratorium Narkotika	582.103.000	-
	6239.BAH Pelayanan Publik Lainnya	97.864.000	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	<i>6239.BAH.001 Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika,Psikotropika,Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali tembakau dan alkohol</i>	85.508.000	-
	<i>6239.BAH.002 Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika</i>	11.912.000	-
	<i>6239.BAH.003 Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis</i>	444.000	-
	<i>6239.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk</i>	3.245.800.000	-
	<i>6239.BJA.001 Identifikasi Narkotika</i>	451.800.000	-
	<i>6239.BJA.U01 Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya</i>	2.794.000.000	-
	066.01.WA Program Dukungan Manajemen	-	1.269.187.531.000
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	-	700.263.779.000
	<i>3236.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	691.071.279.000	-
	<i>3236.EBA.994 Layanan Perkantoran</i>	691.071.279.000	-
	<i>3236.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	9.192.500.000	-
	<i>3236.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan</i>	9.192.500.000	-
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	-	13.240.292.000
	<i>3237.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1.802.135.000	-
	<i>3237.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>	1.802.135.000	-
	<i>3237.EBC Layanan Manajemen SDM Internal</i>	11.438.157.000	-
	<i>3237.EBC.954 Layanan Manajemen SDM</i>	11.438.157.000	-
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	-	12.213.314.000
	<i>3238.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	12.213.314.000	-
	<i>3238.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	6.908.474.000	-
	<i>3238.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	5.304.840.000	-
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	-	520.806.833.000
	<i>3239.CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan</i>	43.766.459.000	-
	<i>3239.CCF.001 Pemeliharaan Alat Khusus Teknologi Intelijen</i>	33.169.850.000	-
	<i>3239.CCF.002 Pemeliharaan Sarana Operasi Direktorat Interdiksi</i>	3.428.981.000	-
	<i>3239.CCF.003 Pemeliharaan dan Perawatan Unit K-9 Satwa Pelacak</i>	4.249.990.000	-
	<i>3239.CCF.005 Kalibrasi Instrumen dan Peralatan Laboratorium</i>	350.000.000	-
	<i>3239.CCF.006 Pemeliharaan dan Perawatan Alat Incenerator</i>	383.158.000	-
	<i>3239.CCF.007 Pemeliharaan sarana operasi Direktorat Penindakan dan Pengejaran</i>	2.184.480.000	-
	<i>3239.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	443.672.212.000	-
	<i>3239.EBA.956 Layanan BMN</i>	3.345.658.000	-
	<i>3239.EBA.962 Layanan Umum</i>	47.493.340.000	-
	<i>3239.EBA.994 Layanan Perkantoran</i>	392.833.214.000	-
	<i>3239.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	6.827.047.000	-
	<i>3239.EBB.951 Layanan Sarana Internal</i>	6.027.047.000	-
	<i>3239.EBB.971 Layanan Prasarana Internal</i>	800.000.000	-
	<i>3239.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	1.541.115.000	-
	<i>3239.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</i>	1.541.115.000	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	3239.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	25.000.000.000	-
	<i>3239.RAF.001 Sarana Laboratorium Narkoba Daerah</i>	<i>25.000.000.000</i>	-
5	3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	-	4.944.789.000
	3241.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.944.789.000	-
	<i>3241.EBD.965 Layanan Audit Internal</i>	<i>4.944.789.000</i>	-
6	3242 Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	-	3.126.624.000
	3242.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.126.624.000	-
	<i>3242.EBA.963 Layanan data dan informasi</i>	<i>3.126.624.000</i>	-
7	3244 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	-	5.021.222.000
	3244.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	5.021.222.000	-
	<i>3244.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal</i>	<i>5.021.222.000</i>	-
8	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	-	9.570.678.000
	3979.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.570.678.000	-
	<i>3979.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i>	<i>8.084.039.000</i>	-
	<i>3979.EBA.959 Layanan Protokoler</i>	<i>1.486.639.000</i>	-

LAMPIRAN V
RINCIAN ALOKASI ANGGARAN UNIT KERJA PUSAT, BNNP, DAN BNNK TAHUN 2024

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
1	15405	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	1.879.581.000	1.254.829.000	87.308.000	11.320.000	7.091.000	1.139.110.000	10.000.000			
2	15515	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	1.879.070.000	1.247.822.000	88.468.000	11.320.000	7.091.000	1.130.943.000	10.000.000			
3	20558	BNN KABUPATEN BOGOR	1.903.922.000	1.300.376.000	90.780.000	11.280.000	13.151.000	1.175.165.000	10.000.000			
4	20761	BNN KABUPATEN CIANJUR	1.928.984.000	1.315.038.000	95.540.000	11.280.000	12.971.000	1.185.247.000	10.000.000			
5	25137	BNN KOTA BANDUNG	1.824.728.000	1.147.553.000	94.108.000	11.280.000	6.575.000	1.025.590.000	10.000.000			
6	25447	BNN KOTA CIREBON	1.950.818.000	1.277.867.000	95.800.000	11.280.000	13.361.000	1.147.426.000	10.000.000			
7	26118	BNN KOTA CIMAHI	1.895.278.000	1.265.905.000	94.192.000	11.280.000	12.689.000	1.137.744.000	10.000.000			
8	31963	BNN KABUPATEN MAGELANG	1.724.579.000	1.132.913.000	93.488.000	10.080.000	12.809.000	1.006.536.000	10.000.000			
9	32057	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	1.642.560.000	1.082.335.000	88.268.000	10.880.000	12.809.000	960.378.000	10.000.000			
10	35665	BNN KOTA SURAKARTA	1.781.312.000	1.210.567.000	101.100.000	10.080.000	12.839.000	1.076.548.000	10.000.000			
11	40173	BNN KABUPATEN BANTUL	1.641.639.000	1.087.400.000	88.418.000	10.380.000	13.863.000	964.739.000	10.000.000			
12	40256	BNN KABUPATEN SLEMAN	1.754.996.000	1.188.156.000	88.798.000	10.880.000	13.563.000	1.064.915.000	10.000.000			
13	45165	BNN KOTA YOGYAKARTA	1.603.189.000	1.110.764.000	83.668.000	10.880.000	6.393.000	999.823.000	10.000.000			
14	52858	BNN KABUPATEN TUBAN	1.654.864.000	1.083.205.000	73.368.000	10.940.000	13.765.000	975.132.000	10.000.000			
15	60534	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	1.809.597.000	1.306.787.000	88.600.000	11.000.000	13.570.000	1.183.617.000	10.000.000			
16	61331	BNN KABUPATEN GAYO LUES	2.257.599.000	1.323.962.000	92.260.000	11.000.000	13.840.000	1.196.862.000	10.000.000			
17	61818	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	1.854.908.000	1.313.642.000	88.120.000	11.000.000	12.850.000	1.191.672.000	10.000.000			
18	65137	BNN KOTA BANDA ACEH	1.697.560.000	1.140.998.000	87.028.000	10.500.000	6.370.000	1.027.100.000	10.000.000			
19	70258	BNN KABUPATEN KARO	1.902.655.000	1.287.462.000	86.046.000	10.760.000	29.064.000	1.151.592.000	10.000.000			
20	70545	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	1.603.959.000	1.045.167.000	89.650.000	10.260.000	12.790.000	922.467.000	10.000.000			
21	70639	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	1.653.418.000	1.031.515.000	88.634.000	10.260.000	13.006.000	909.615.000	10.000.000			
22	72117	BNN KABUPATEN BATU BARA	1.594.762.000	1.041.048.000	90.654.000	10.260.000	12.556.000	917.578.000	10.000.000			
23	75345	BNN KOTA BINJAI	1.956.327.000	1.331.422.000	96.550.000	10.760.000	12.286.000	1.201.826.000	10.000.000			
24	75540	BNN KOTA TANJUNG BALAI	1.877.703.000	1.282.203.000	88.574.000	10.760.000	27.348.000	1.145.521.000	10.000.000			
25	81240	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	1.745.050.000	1.158.950.000	90.870.000	10.340.000	12.769.000	1.034.971.000	10.000.000			
26	91236	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	1.885.661.000	1.334.395.000	90.868.000	10.960.000	13.820.000	1.208.747.000	10.000.000			
27	111079	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	1.511.498.000	996.538.000	87.690.000	10.340.000	13.725.000	874.783.000	10.000.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
28	120855	BNN KABUPATEN WAY KANAN	1.507.331.000	996.971.000	88.772.000	10.180.000	12.150.000	875.869.000	10.000.000			
29	130761	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	1.909.547.000	1.339.094.000	92.944.000	10.960.000	11.898.000	1.213.292.000	10.000.000			
30	145161	BNN KOTA PALANGKARAYA	1.917.691.000	1.327.623.000	85.404.000	10.800.000	6.175.000	1.215.244.000	10.000.000			
31	150243	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	1.582.739.000	1.023.402.000	89.502.000	10.460.000	12.445.000	900.995.000	10.000.000			
32	150751	BNN KABUPATEN TABALONG	1.563.646.000	1.044.331.000	87.666.000	10.460.000	12.649.000	923.556.000	10.000.000			
33	150958	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	1.518.985.000	983.784.000	88.646.000	10.460.000	12.553.000	862.125.000	10.000.000			
34	165162	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	9.999.950.000	7.731.368.000	40.860.000	263.928.000		7.426.580.000				
35	165249	BNN KOTA BALIKPAPAN	2.049.477.000	1.450.379.000	90.736.000	11.680.000	15.715.000	1.322.248.000	10.000.000			
36	165352	BNN KOTA TARAKAN	1.923.748.000	1.306.250.000	92.948.000	11.280.000	6.549.000	1.185.473.000	10.000.000			
37	165441	BNN KOTA BONTANG	1.580.486.000	1.039.744.000	89.892.000	11.180.000	16.015.000	912.657.000	10.000.000			
38	190633	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	2.066.271.000	1.221.149.000	110.118.000	11.680.000	14.226.000	1.075.125.000	10.000.000			
39	195175	Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	10.283.068.000	7.981.540.000	72.063.000	300.000.000	43.186.000	7.566.291.000				
40	205232	BNN KOTA BAU-BAU	1.823.677.000	1.054.952.000	111.768.000	10.780.000	16.544.000	905.860.000	10.000.000			
41	220155	BNN KABUPATEN BULELENG	1.671.814.000	954.044.000	106.124.000	10.780.000	16.472.000	810.668.000	10.000.000			
42	220348	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	1.420.139.000	906.686.000	39.144.000	10.780.000	11.290.000	835.472.000	10.000.000			
43	220547	BNN KABUPATEN KARANGASEM	1.500.787.000	922.510.000	95.328.000	10.780.000	16.460.000	789.942.000	10.000.000			
44	295420	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	2.470.353.000	1.769.519.000	111.476.000	11.000.000	13.555.000	1.623.488.000	10.000.000			
45	310153	BNN KABUPATEN GORONTALO	1.514.247.000	997.489.000	91.538.000	10.300.000	14.464.000	871.187.000	10.000.000			
46	310721	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	1.552.215.000	1.022.485.000	94.058.000	10.300.000	14.764.000	893.363.000	10.000.000			
47	320229	BNN KABUPATEN KARIMUN	2.022.600.000	1.445.301.000	92.700.000	11.400.000	13.734.000	1.317.467.000	10.000.000			
48	325136	BNN KOTA BATAM	1.799.485.000	1.295.254.000	88.271.000	11.400.000	6.408.000	1.179.175.000	10.000.000			
49	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	15.539.335.000	15.539.335.000	2.831.898.000		228.989.000	7.457.226.000				5.021.222.000
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	40.840.909.000	36.915.142.000	4.172.847.000		395.000.000	32.347.295.000				
51	403708	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	6.258.848.000	4.720.092.000	2.235.241.000	29.250.000	36.097.000	2.399.504.000	20.000.000			
52	403709	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	1.607.695.000	1.067.975.000	89.850.000	10.840.000	13.485.000	943.800.000	10.000.000			
53	403710	BNN KOTA DUMAI	1.678.927.000	1.150.590.000	90.572.000	10.760.000	14.420.000	1.024.838.000	10.000.000			
54	403711	BNN KOTA TANGERANG	1.988.343.000	1.294.658.000	101.788.000	11.000.000	13.351.000	1.158.519.000	10.000.000			
55	403713	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	1.452.026.000	951.621.000	88.032.000	10.920.000	12.838.000	829.831.000	10.000.000			
56	403714	BNN KABUPATEN SUMEDANG	1.720.972.000	1.110.987.000	93.280.000	11.280.000	13.061.000	983.366.000	10.000.000			
57	403715	BNN KABUPATEN PASURUAN	1.568.267.000	1.008.869.000	86.488.000	11.440.000	13.663.000	887.278.000	10.000.000			
58	403716	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	1.627.866.000	981.736.000	92.196.000	11.280.000	13.195.000	855.065.000	10.000.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	5.822.278.000	4.895.436.000	71.270.000	174.620.000	15.688.000	4.633.858.000				
60	418305	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	1.861.139.000	1.289.386.000	91.560.000	12.114.000	10.320.000	1.165.392.000	10.000.000			
61	418307	BNN KABUPATEN PIDIE	1.818.035.000	1.207.042.000	92.004.000	11.000.000	12.760.000	1.081.278.000	10.000.000			
62	418308	BNN KOTA TEBING TINGGI	1.745.490.000	1.131.714.000	90.566.000	10.760.000	12.011.000	1.008.377.000	10.000.000			
63	418309	BNN KABUPATEN SOLOK	1.703.929.000	1.159.633.000	87.462.000	10.840.000	12.529.000	1.038.802.000	10.000.000			
64	418310	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	1.655.520.000	1.113.308.000	92.058.000	10.840.000	13.665.000	986.745.000	10.000.000			
65	418311	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	1.637.345.000	1.092.038.000	80.510.000	10.840.000	14.175.000	976.513.000	10.000.000			
66	418313	BNN KOTA BENGKULU	1.566.488.000	981.209.000	85.144.000	10.680.000	6.330.000	869.055.000	10.000.000			
67	418315	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	1.534.739.000	1.001.307.000	88.928.000	10.680.000	12.006.000	879.693.000	10.000.000			
68	418316	BNN KOTA METRO	1.556.013.000	967.825.000	96.140.000	10.680.000	11.934.000	839.071.000	10.000.000			
69	418317	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	1.650.631.000	1.084.871.000	88.820.000	11.280.000	13.331.000	961.440.000	10.000.000			
70	418318	BNN KOTA TASIKMALAYA	1.621.354.000	1.059.909.000	89.860.000	11.280.000	13.151.000	935.618.000	10.000.000			
71	418319	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	1.769.684.000	1.218.709.000	88.660.000	10.960.000	11.388.000	1.097.701.000	10.000.000			
72	418320	BNN KABUPATEN NUNUKAN	1.749.885.000	1.161.350.000	98.900.000	11.280.000	14.523.000	1.026.647.000	10.000.000			
73	418322	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	1.601.725.000	1.045.153.000	90.662.000	10.960.000	12.445.000	921.086.000	10.000.000			
74	418323	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	1.671.324.000	1.109.363.000	81.028.000	11.680.000	18.140.000	988.515.000	10.000.000			
75	418324	BNN KABUPATEN SUMBAWA	1.696.932.000	1.134.443.000	96.530.000	11.040.000	20.278.000	996.595.000	10.000.000			
76	418537	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Batam Kepulauan Riau	8.597.482.000	7.279.764.000		250.000.000	23.246.000	7.006.518.000				
77	418543	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Kalianda Lampung Selatan	6.095.769.000	5.054.202.000	109.390.000	169.100.000		4.775.712.000				
78	419175	BNN Kota Sabang	1.735.094.000	1.220.392.000	88.676.000	11.000.000	13.636.000	1.097.080.000	10.000.000			
79	419176	BNN Kota Gunungsitoli	2.364.628.000	1.277.936.000	149.162.000	10.760.000	19.990.000	1.088.024.000	10.000.000			
80	419177	BNN Kota Sawahlunto	1.885.240.000	1.353.511.000	87.830.000	10.840.000	12.559.000	1.232.282.000	10.000.000			
81	419202	BNN Kabupaten Ogan Ilir	1.743.048.000	1.233.800.000	89.270.000	10.840.000	13.485.000	1.110.205.000	10.000.000			
82	419203	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1.673.301.000	1.155.718.000	88.028.000	10.840.000	11.567.000	1.035.283.000	10.000.000			
83	419222	BNN Kabupaten Pelalawan	1.896.670.000	1.236.427.000	72.812.000	10.960.000	13.370.000	1.129.285.000	10.000.000			
84	419223	BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	1.742.131.000	1.185.746.000	91.228.000	10.680.000	13.266.000	1.060.572.000	10.000.000			
85	419224	BNN Kabupaten Tanggamus	1.732.334.000	1.200.636.000	90.148.000	10.680.000	11.970.000	1.077.838.000	10.000.000			
86	419225	BNN Kabupaten Bangka	1.849.195.000	1.327.210.000	88.512.000	10.920.000	12.688.000	1.205.090.000	10.000.000			
87	419226	BNN Kota Cilegon	1.771.591.000	1.181.604.000	90.504.000	11.000.000	12.433.000	1.057.667.000	10.000.000			
88	419227	BNN Kabupaten Sukabumi	1.915.253.000	1.352.295.000	88.044.000	11.280.000	13.037.000	1.229.934.000	10.000.000			
89	419228	BNN Kota Tegal	1.726.536.000	1.160.675.000	88.348.000	10.880.000	12.929.000	1.038.518.000	10.000.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
90	419246	BNN Kabupaten Banyumas	1.802.280.000	1.214.220.000	91.236.000	10.880.000	12.911.000	1.089.193.000	10.000.000			
91	419247	BNN Kabupaten Sumenep	1.658.892.000	1.070.686.000	88.916.000	11.440.000	13.825.000	946.505.000	10.000.000			
92	419248	BNN Kota Mojokerto	1.735.397.000	1.126.535.000	91.108.000	11.440.000	13.645.000	1.000.342.000	10.000.000			
93	419249	BNN KABUPATEN SINTANG	1.899.219.000	1.319.789.000	105.720.000	10.960.000	12.630.000	1.180.479.000	10.000.000			
94	419256	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	1.636.580.000	1.072.565.000	90.246.000	10.800.000	13.309.000	948.210.000	10.000.000			
95	419257	BNN Kabupaten Barito Kuala	1.768.298.000	1.195.774.000	87.878.000	10.960.000	12.445.000	1.074.491.000	10.000.000			
96	419258	BNN Kota Jakarta Utara	1.995.464.000	1.344.031.000	87.308.000	11.320.000	7.091.000	1.228.312.000	10.000.000			
97	419259	BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	1.878.235.000	1.325.948.000	88.540.000	11.680.000	14.588.000	1.201.140.000	10.000.000			
98	419260	BNN Kabupaten Bone	1.826.947.000	1.199.628.000	112.944.000	11.680.000	13.566.000	1.051.438.000	10.000.000			
99	419261	BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	1.841.143.000	1.266.290.000	92.378.000	11.040.000	15.580.000	1.137.292.000	10.000.000			
100	419262	BNN Kabupaten Muna	1.772.116.000	1.158.773.000	95.992.000	17.700.000	17.240.000	1.017.841.000	10.000.000			
101	419263	BNN KABUPATEN BOALEMO	1.739.509.000	1.202.722.000	93.098.000	10.800.000	15.064.000	1.073.760.000	10.000.000			
102	419264	BNN Kabupaten Bima	1.686.949.000	1.139.132.000	90.794.000	11.040.000	21.778.000	1.005.520.000	10.000.000			
103	419265	BNN Kabupaten Belu	1.764.011.000	1.231.894.000	92.072.000	11.360.000	13.604.000	1.104.858.000	10.000.000			
104	419279	BNN Kabupaten Buru Selatan	1.782.314.000	1.266.171.000	93.642.000	11.520.000	14.805.000	1.136.204.000	10.000.000			
105	419280	BNN Kabupaten Pulau Morotai	1.815.802.000	1.257.054.000	93.708.000	11.600.000	12.758.000	1.128.988.000	10.000.000			
106	419286	BNN Kabupaten Mimika	1.957.847.000	1.342.758.000	99.592.000	12.240.000	27.853.000	1.193.073.000	10.000.000			
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	11.775.230.000	11.775.230.000				8.648.606.000			3.126.624.000	
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	35.999.764.000	29.453.723.000	10.964.608.000	387.210.000	223.262.000	17.482.849.000	395.794.000			
109	681595	SEKRETARIAT UTAMA	513.665.954.000	513.665.954.000	408.456.541.000	8.754.331.000	8.359.793.000	81.340.376.000	6.754.913.000			
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA	9.398.101.000	9.398.101.000				4.453.312.000		4.944.789.000		
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	12.898.551.000	2.770.444.000				2.770.444.000				
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.665.318.000	1.252.709.000				1.252.709.000				
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	106.059.739.000	49.994.621.000				49.994.621.000				
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	19.625.924.000	1.356.879.000				1.356.879.000				
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	8.044.784.000	951.214.000				951.214.000				
116	682448	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	11.647.170.000	9.785.803.000	6.763.582.000	29.900.000	15.235.000	2.957.086.000	20.000.000			
117	682452	BNN PROVINSI BANTEN	9.269.840.000	7.842.653.000	4.866.004.000	28.500.000	14.729.000	2.913.420.000	20.000.000			
118	682469	BNN PROVINSI JAWA BARAT	25.491.173.000	23.371.247.000	18.786.764.000	28.850.000	20.883.000	4.514.750.000	20.000.000			
119	682473	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	19.891.004.000	17.911.470.000	15.103.049.000	27.100.000	17.565.000	2.743.756.000	20.000.000			
120	682480	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	22.159.980.000	20.209.572.000	16.758.897.000	29.550.000	22.401.000	3.378.724.000	20.000.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
121	682494	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	13.677.936.000	12.344.465.000	9.744.656.000	27.100.000	14.395.000	2.538.314.000	20.000.000			
122	682502	BNN PROVINSI LAMPUNG	12.202.269.000	10.633.975.000	7.767.562.000	27.700.000	14.516.000	2.804.197.000	20.000.000			
123	682516	BNN PROVINSI BALI	9.896.172.000	7.452.459.000	4.670.653.000	29.250.000	16.234.000	2.716.322.000	20.000.000			
124	682520	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	9.374.367.000	7.735.307.000	5.555.214.000	28.200.000	16.374.000	2.115.519.000	20.000.000			
125	682537	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10.017.557.000	8.866.771.000	6.630.530.000	28.600.000	14.154.000	2.173.487.000	20.000.000			
126	682541	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	21.330.220.000	18.523.486.000	15.916.050.000	28.100.000	17.106.000	2.542.230.000	20.000.000			
127	682558	BNN PROVINSI BENGKULU	10.348.478.000	8.454.577.000	5.280.645.000	26.700.000	13.434.000	3.113.798.000	20.000.000			
128	682562	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	18.018.301.000	15.997.370.000	13.343.688.000	27.400.000	17.989.000	2.588.293.000	20.000.000			
129	682579	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	25.546.370.000	22.622.473.000	19.715.824.000	27.050.000	18.368.000	2.841.231.000	20.000.000			
130	682583	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	9.023.175.000	7.571.882.000	5.136.074.000	27.400.000	14.207.000	2.374.201.000	20.000.000			
131	682590	BNN PROVINSI JAMBI	8.880.937.000	7.309.516.000	4.129.896.000	27.400.000	13.773.000	3.118.447.000	20.000.000			
132	682605	BNN PROVINSI RIAU	10.824.124.000	8.810.649.000	5.434.096.000	23.535.000	33.264.000	3.299.754.000	20.000.000			
133	682612	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.470.403.000	6.133.384.000	3.648.745.000	28.150.000	14.016.000	2.422.473.000	20.000.000			
134	682626	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9.500.815.000	7.536.114.000	4.376.089.000	30.250.000	38.128.000	3.071.647.000	20.000.000			
135	682630	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	9.893.364.000	8.168.061.000	5.516.232.000	27.450.000	15.458.000	2.588.921.000	20.000.000			
136	682647	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	12.010.113.000	10.065.915.000	6.987.757.000	27.850.000	15.785.000	3.014.523.000	20.000.000			
137	682651	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	8.257.544.000	6.151.288.000	2.789.503.000	31.000.000	24.846.000	3.285.939.000	20.000.000			
138	682668	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8.126.807.000	6.527.711.000	4.282.127.000	26.750.000	13.515.000	2.185.319.000	20.000.000			
139	682672	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	8.461.044.000	6.943.038.000	4.517.431.000	31.000.000	15.452.000	2.359.155.000	20.000.000			
140	682689	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	14.043.833.000	12.480.249.000	9.973.269.000	28.200.000	15.746.000	2.443.034.000	20.000.000			
141	682693	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	12.043.657.000	10.266.330.000	7.367.678.000	31.000.000	15.334.000	2.832.318.000	20.000.000			
142	682701	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	16.732.776.000	14.805.421.000	12.522.063.000	29.250.000	15.118.000	2.218.990.000	20.000.000			
143	682715	BNN PROVINSI GORONTALO	11.563.847.000	10.139.196.000	7.840.206.000	27.150.000	14.732.000	2.237.108.000	20.000.000			
144	682722	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	5.817.295.000	4.277.203.000	2.518.691.000	29.250.000	13.779.000	1.695.483.000	20.000.000			
145	682736	BNN PROVINSI MALUKU	9.182.516.000	7.132.492.000	4.165.984.000	30.700.000	15.175.000	2.900.633.000	20.000.000			
146	682740	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	12.146.492.000	10.520.302.000	8.200.759.000	31.050.000	30.714.000	2.237.779.000	20.000.000			
147	682757	BNN PROVINSI PAPUA	8.073.257.000	6.323.564.000	3.843.707.000	33.850.000	18.727.000	2.407.280.000	20.000.000			
148	682761	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	5.590.282.000	3.981.961.000	1.390.482.000	31.750.000	5.031.000	2.534.698.000	20.000.000			
149	682778	BNN KABUPATEN GARUT	1.900.431.000	1.261.942.000	93.332.000	11.280.000	13.139.000	1.134.191.000	10.000.000			
150	682782	BNN KABUPATEN KUNINGAN	1.845.535.000	1.271.895.000	89.284.000	11.280.000	13.331.000	1.148.000.000	10.000.000			
151	682799	BNN KABUPATEN CIAMIS	1.851.621.000	1.262.886.000	91.484.000	11.280.000	13.151.000	1.136.971.000	10.000.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
152	682804	BNN KABUPATEN CILACAP	1.869.890.000	1.310.386.000	88.660.000	10.880.000	13.049.000	1.187.797.000	10.000.000			
153	682811	BNN KABUPATEN KENDAL	1.857.926.000	1.308.645.000	89.388.000	10.880.000	12.749.000	1.185.628.000	10.000.000			
154	682825	BNN KOTA MALANG	1.919.539.000	1.325.982.000	89.968.000	11.440.000	13.663.000	1.200.911.000	10.000.000			
155	682832	BNN KOTA BATU	1.930.959.000	1.326.835.000	92.343.000	11.440.000	13.747.000	1.199.305.000	10.000.000			
156	682846	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	1.939.792.000	1.301.297.000	93.516.000	11.440.000	13.765.000	1.172.576.000	10.000.000			
157	682850	BNN KABUPATEN NGANJUK	1.938.275.000	1.299.171.000	58.920.000	11.440.000	13.765.000	1.205.046.000	10.000.000			
158	682867	BNN KOTA MATARAM	1.685.598.000	1.082.923.000	54.360.000	11.040.000	6.574.000	1.000.949.000	10.000.000			
159	682871	BNN KOTA LHOEKSEUMAWE	2.387.131.000	1.398.458.000	99.160.000	20.074.000	13.060.000	1.256.164.000	10.000.000			
160	682888	BNN KOTA LANGSA	2.007.189.000	1.422.043.000	91.984.000	11.000.000	13.426.000	1.295.633.000	10.000.000			
161	682892	BNN KOTA PAGARALAM	1.858.266.000	1.318.151.000	91.310.000	10.840.000	13.935.000	1.192.066.000	10.000.000			
162	682900	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	1.796.455.000	1.242.765.000	95.208.000	10.840.000	13.995.000	1.112.722.000	10.000.000			
163	682914	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	1.756.187.000	1.215.705.000	96.288.000	10.840.000	14.145.000	1.084.432.000	10.000.000			
164	682921	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	1.864.645.000	1.306.247.000	86.786.000	33.540.000	20.170.000	1.155.751.000	10.000.000			
165	682935	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	1.869.108.000	1.241.725.000	92.974.000	10.760.000	12.556.000	1.115.435.000	10.000.000			
166	682942	BNN KABUPATEN LANGKAT	2.098.739.000	1.269.133.000	109.058.000	10.760.000	12.322.000	1.126.993.000	10.000.000			
167	682956	BNN KOTA PAYAKUMBUH	1.883.287.000	1.313.634.000	89.610.000	10.840.000	12.619.000	1.190.565.000	10.000.000			
168	682960	BNN KOTA PANGKAL PINANG	1.825.099.000	1.258.514.000	85.948.000	10.920.000	6.394.000	1.145.252.000	10.000.000			
169	682977	BNN KOTA TANJUNG PINANG	2.033.722.000	1.409.453.000	95.392.000	11.400.000	13.884.000	1.278.777.000	10.000.000			
170	682981	BNN KOTA PONTIANAK	1.895.590.000	1.299.610.000	90.548.000	10.960.000	6.330.000	1.181.772.000	10.000.000			
171	682998	BNN KOTA SINGKAWANG	1.948.459.000	1.345.887.000	92.892.000	10.960.000	11.820.000	1.220.215.000	10.000.000			
172	683000	BNN KOTA BANJARMASIN	1.843.593.000	1.229.321.000	90.548.000	10.960.000	6.343.000	1.111.470.000	10.000.000			
173	689011	BNN KOTA BANJARBARU	1.919.608.000	1.209.994.000	97.722.000	10.960.000	12.595.000	1.078.717.000	10.000.000			
174	689025	BNN KOTA SAMARINDA	1.931.456.000	1.347.988.000	86.684.000	11.680.000	5.701.000	1.233.923.000	10.000.000			
175	689032	BNN KABUPATEN MOROWALI	1.845.216.000	1.172.451.000	98.890.000	11.040.000	15.040.000	1.037.481.000	10.000.000			
176	689046	BNN KOTA PALOPO	1.864.710.000	1.231.776.000	96.198.000	11.680.000	14.226.000	1.099.672.000	10.000.000			
177	689050	BNN KABUPATEN KOLAKA	1.990.010.000	1.217.223.000	110.080.000	11.280.000	14.012.000	1.071.851.000	10.000.000			
178	689067	BNN KABUPATEN JAYAPURA	2.024.486.000	1.404.845.000	94.904.000	12.240.000	19.081.000	1.268.620.000	10.000.000			
179	689444	BNN KABUPATEN BIREUEN	2.391.399.000	1.439.652.000	99.588.000	11.000.000	12.940.000	1.306.124.000	10.000.000			
180	689451	BNN KABUPATEN ASAHAN	1.947.704.000	1.244.874.000	56.006.000	10.760.000	12.760.000	1.155.348.000	10.000.000			
181	689465	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	1.787.720.000	1.232.058.000	99.794.000	10.760.000	59.224.000	1.052.280.000	10.000.000			
182	689472	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1.918.708.000	1.253.720.000	83.614.000	17.860.000	33.112.000	1.099.163.000	19.971.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
183	689486	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	1.943.321.000	1.281.638.000	64.974.000	10.760.000	12.406.000	1.183.498.000	10.000.000			
184	689490	BNN KOTA PRABUMULIH	1.784.382.000	1.190.727.000	94.490.000	10.840.000	13.485.000	1.061.912.000	10.000.000			
185	689508	BNN KOTA JAMBI	1.776.175.000	1.246.993.000	86.372.000	11.040.000	8.297.000	1.131.284.000	10.000.000			
186	689512	BNN KABUPATEN BATANGHARI	1.854.889.000	1.315.786.000	89.128.000	11.040.000	11.477.000	1.194.141.000	10.000.000			
187	689529	BNN KOTA PEKANBARU	1.864.648.000	1.284.663.000	85.900.000	10.760.000	6.278.000	1.171.725.000	10.000.000			
188	689533	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	1.693.039.000	1.185.116.000	91.964.000	10.680.000	11.934.000	1.060.538.000	10.000.000			
189	689540	BNN KABUPATEN BELITUNG	1.851.634.000	1.329.988.000	90.928.000	10.920.000	15.268.000	1.202.872.000	10.000.000			
190	689554	BNN KABUPATEN SIDOARJO	2.170.920.000	1.444.998.000	60.544.000	11.440.000	13.735.000	1.349.279.000	10.000.000			
191	689561	BNN KOTA DEPOK	2.037.534.000	1.368.528.000	98.100.000	11.280.000	13.331.000	1.235.817.000	10.000.000			
192	689575	BNN KABUPATEN KARAWANG	1.781.638.000	1.183.018.000	88.712.000	11.280.000	13.169.000	1.059.857.000	10.000.000			
193	689582	BNN KABUPATEN BATANG	1.854.545.000	1.261.607.000	92.908.000	10.880.000	12.809.000	1.135.010.000	10.000.000			
194	689596	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	1.796.456.000	1.235.381.000	89.548.000	10.880.000	12.989.000	1.111.964.000	10.000.000			
195	689601	BNN KOTA SURABAYA	2.186.098.000	1.479.005.000	97.780.000	11.440.000	4.171.000	1.355.614.000	10.000.000			
196	689618	BNN KOTA KEDIRI	1.973.693.000	1.333.488.000	93.476.000	11.440.000	13.705.000	1.204.867.000	10.000.000			
197	689622	BNN KABUPATEN MALANG	1.847.530.000	1.235.265.000	94.420.000	19.440.000	13.663.000	1.097.742.000	10.000.000			
198	689639	BNN KABUPATEN GRESIK	1.823.399.000	1.208.469.000	92.044.000	11.440.000	13.645.000	1.081.340.000	10.000.000			
199	689643	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	2.023.833.000	1.345.740.000	99.316.000	11.440.000	13.765.000	1.211.219.000	10.000.000			
200	689650	BNN KABUPATEN LUMAJANG	1.768.828.000	1.254.356.000	86.620.000	11.440.000	13.861.000	1.132.435.000	10.000.000			
201	689664	BNN KABUPATEN BLITAR	1.901.830.000	1.289.882.000	89.380.000	11.440.000	13.825.000	1.165.237.000	10.000.000			
202	689671	BNN KABUPATEN KEDIRI	1.755.975.000	1.184.336.000	90.692.000	11.440.000	13.705.000	1.058.499.000	10.000.000			
203	689685	BNN KABUPATEN SANGGAU	1.810.673.000	1.258.800.000	93.076.000	10.960.000	12.096.000	1.132.668.000	10.000.000			
204	689692	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	1.809.869.000	1.267.299.000	90.464.000	10.960.000	11.658.000	1.144.217.000	10.000.000			
205	689707	BNN KABUPATEN BALANGAN	1.792.654.000	1.251.282.000	87.998.000	10.960.000	12.625.000	1.129.699.000	10.000.000			
206	689711	BNN KOTA PALLU	1.927.525.000	1.202.281.000	95.188.000	11.040.000	6.304.000	1.079.749.000	10.000.000			
207	689728	BNN KABUPATEN DONGGALA	1.783.042.000	1.150.577.000	89.226.000	11.040.000	13.420.000	1.026.891.000	10.000.000			
208	689732	BNN KABUPATEN POSO	1.840.915.000	1.185.382.000	94.048.000	11.040.000	14.320.000	1.055.974.000	10.000.000			
209	689749	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	1.979.048.000	1.330.666.000	97.690.000	11.040.000	14.740.000	1.197.196.000	10.000.000			
210	689753	BNN KOTA KENDARI	1.927.664.000	1.159.624.000	106.784.000	11.280.000	6.356.000	1.025.204.000	10.000.000			
211	689760	BNN KOTA BITUNG	1.874.094.000	1.296.346.000	88.764.000	11.680.000	14.138.000	1.171.764.000	10.000.000			
212	689774	BNN KOTA MANADO	1.943.484.000	1.322.074.000	56.144.000	11.680.000	6.590.000	1.237.660.000	10.000.000			
213	689781	BNN KOTA GORONTALO	1.757.866.000	1.228.060.000	87.068.000	10.800.000	6.304.000	1.113.888.000	10.000.000			

NO	KODE	SATKER	TOTAL ANGGARAN	ANGGARAN DUKMAN	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
214	689795	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	1.849.775.000	1.306.392.000	93.098.000	10.800.000	13.864.000	1.178.630.000	10.000.000			
215	689800	BNN KOTA DENPASAR	1.925.206.000	1.323.272.000	86.068.000	11.280.000	6.794.000	1.209.130.000	10.000.000			
216	689817	BNN KABUPATEN BADUNG	2.279.828.000	1.471.843.000	110.456.000	11.280.000	16.010.000	1.324.097.000	10.000.000			
217	689821	BNN KABUPATEN GIANYAR	2.105.949.000	1.419.622.000	97.844.000	11.280.000	16.232.000	1.284.266.000	10.000.000			
218	689838	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	1.728.568.000	1.175.238.000	93.482.000	11.040.000	16.678.000	1.044.038.000	10.000.000			
219	689842	BNN KOTA KUPANG	1.744.866.000	1.226.153.000	87.148.000	11.360.000	10.664.000	1.106.981.000	10.000.000			
220	689859	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	1.722.769.000	1.207.603.000	92.652.000	11.360.000	12.854.000	1.080.737.000	10.000.000			
221	689863	BNN KOTA TUAL	2.029.390.000	1.263.764.000	116.682.000	11.520.000	14.805.000	1.110.757.000	10.000.000			
222	689870	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	1.964.346.000	1.439.310.000	94.566.000	11.600.000	12.758.000	1.310.386.000	10.000.000			
223	689884	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1.812.585.000	1.290.710.000	92.316.000	11.600.000	16.868.000	1.159.926.000	10.000.000			
JUMLAH			1.553.704.466.000	1.269.187.531.000	700.263.779.000	13.240.292.000	12.213.314.000	520.806.833.000	9.570.678.000	4.944.789.000	3.126.624.000	5.021.222.000

NO	KODE	SATKER	ANGGARAN PAGN	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	3.925.767.000																		3.925.767.000
51	403708	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.538.756.000	116.000.000			110.000.000			29.340.000	246.002.000	107.764.000	14.980.000	231.670.000				500.000.000		183.000.000	
52	403709	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	539.720.000	106.000.000						6.532.000	189.405.000		15.295.000	110.488.000				35.000.000		77.000.000	
53	403710	BNN KOTA DUMAI	528.337.000	106.000.000						6.643.000	189.470.000		14.665.000	107.559.000				40.000.000		64.000.000	
54	403711	BNN KOTA TANGERANG	693.685.000	106.000.000						6.825.000	220.045.000	8.850.000	14.530.000	242.435.000				30.000.000		65.000.000	
55	403713	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	500.405.000	106.000.000						9.745.000	206.145.000		14.485.000	102.030.000						62.000.000	
56	403714	BNN KABUPATEN SUMEDANG	609.985.000	106.000.000						10.150.000	217.545.000	11.800.000	14.845.000	138.645.000				35.000.000		76.000.000	
57	403715	BNN KABUPATEN PASURUAN	559.398.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	21.700.000	14.890.000	82.228.000				35.000.000		77.600.000	
58	403716	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	646.130.000	106.000.000						6.865.000	198.255.000	61.075.000	15.025.000	143.910.000				50.000.000		65.000.000	
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	926.842.000											16.550.000			910.292.000				
60	418305	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	571.753.000	106.000.000						10.290.000	201.670.000		14.845.000	126.948.000				35.000.000		77.000.000	
61	418307	BNN KABUPATEN PIDIE	610.993.000	106.000.000						6.825.000	201.670.000	3.925.000	14.845.000	165.728.000				35.000.000		77.000.000	
62	418308	BNN KOTA TEBING TINGGI	613.776.000	106.000.000						16.538.000	207.095.000	7.850.000	14.530.000	141.763.000				40.000.000		80.000.000	
63	418309	BNN KABUPATEN SOKOL	544.296.000	106.000.000						9.685.000	189.470.000		14.485.000	112.656.000				35.000.000		77.000.000	
64	418310	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	542.212.000	106.000.000						6.545.000	189.405.000		15.295.000	115.967.000				35.000.000		74.000.000	
65	418311	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	545.307.000	106.000.000						6.532.000	189.405.000		15.295.000	118.075.000				35.000.000		75.000.000	
66	418313	BNN KOTA BENGKULU	585.279.000	106.000.000						13.080.000	191.850.000	3.925.000	14.530.000	152.894.000				35.000.000		68.000.000	
67	418315	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	533.432.000	106.000.000						16.280.000	187.320.000		14.530.000	145.302.000						64.000.000	
68	418316	BNN KOTA METRO	588.188.000	106.000.000						16.280.000	187.320.000	11.775.000	14.530.000	187.283.000						65.000.000	
69	418317	BNN KABUPATEN BANGUNG BARAT	565.760.000	106.000.000						10.150.000	217.545.000		14.845.000	102.220.000				35.000.000		80.000.000	
70	418318	BNN KOTA TASILALAYA	561.445.000	106.000.000						10.165.000	217.545.000	17.700.000	14.845.000	119.190.000						76.000.000	
71	418319	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	550.975.000	106.000.000						9.925.000	209.415.000		14.710.000	133.925.000						77.000.000	
72	418320	BNN KABUPATEN NUNUKAN	588.535.000	106.000.000						9.865.000	189.960.000	29.500.000	14.980.000	173.230.000						65.000.000	
73	418322	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	556.572.000	106.000.000						6.505.000	191.195.000		14.710.000	138.162.000				25.000.000		75.000.000	
74	418323	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	561.961.000	106.000.000						10.465.000	195.320.000		15.295.000	118.881.000				40.000.000		76.000.000	
75	418324	BNN KABUPATEN SUMBAWA	562.489.000	106.000.000						6.545.000	216.570.000		14.665.000	153.709.000						65.000.000	
76	418537	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Batam Kepulauan Riau	1.317.718.000											2.844.000			1.314.874.000				
77	418543	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Kalanda Lampung Selatan	1.041.567.000											3.110.000			1.038.457.000				
78	419175	BNN Kota Sebang	514.702.000	106.000.000						6.825.000	201.670.000		14.845.000	105.362.000						80.000.000	
79	419176	BNN Kota Gunungpolo	1.086.692.000	106.000.000						6.705.000	207.095.000		14.530.000	637.362.000				40.000.000		75.000.000	
80	419177	BNN Kota Sawahlunto	531.729.000	106.000.000						6.745.000	189.470.000	7.850.000	14.485.000	98.179.000				35.000.000		74.000.000	
81	419202	BNN Kabupaten Ogan Ilir	509.248.000	106.000.000						6.732.000	189.405.000		15.295.000	111.816.000						80.000.000	
82	419203	BNN KABUPATEN TANDUNG JABUNG TIMUR	517.583.000	106.000.000						6.530.000	184.065.000	3.925.000	14.710.000	103.353.000				35.000.000		64.000.000	
83	419222	BNN Kabupaten Pabelan	660.243.000	106.000.000						6.705.000	189.470.000	49.075.000	14.665.000	186.328.000				40.000.000		68.000.000	
84	419223	BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	556.385.000	106.000.000						6.465.000	191.850.000		14.530.000	134.540.000				35.000.000		68.000.000	
85	419224	BNN Kabupaten Tanggamus	531.698.000	106.000.000						16.780.000	187.320.000	3.925.000	14.530.000	135.143.000						68.000.000	
86	419225	BNN Kabupaten Bangka	521.985.000	106.000.000						6.785.000	206.145.000	7.850.000	14.485.000	115.720.000						65.000.000	
87	419226	BNN Kota Cilegon	589.987.000	106.000.000						6.775.000	220.045.000	8.850.000	14.530.000	133.787.000				30.000.000		70.000.000	
88	419227	BNN Kabupaten Sukabumi	562.958.000	106.000.000						10.150.000	217.545.000	13.700.000	14.845.000	87.718.000				35.000.000		78.000.000	
89	419228	BNN Kota Tegal	565.861.000	106.000.000						9.850.000	188.555.000	29.500.000	15.463.000	104.493.000				35.000.000		77.000.000	
90	419246	BNN Kabupaten Banyuwangi	588.060.000	106.000.000						9.850.000	188.555.000	9.825.000	15.463.000	143.367.000				35.000.000		80.000.000	
91	419247	BNN Kabupaten Sumenep	588.206.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	9.825.000	14.890.000	123.511.000				35.000.000		77.000.000	
92	419248	BNN Kota Mopkerto	608.862.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	29.500.000	14.890.000	123.492.000				35.000.000		78.000.000	
93	419249	BNN KABUPATEN SINTANG	579.430.000	106.000.000						9.575.000	209.415.000		14.710.000	165.730.000						74.000.000	
94	419256	BNN KABUPATEN KOTA WARENGIN BARAT	564.015.000	106.000.000						6.625.000	216.970.000		14.215.000	115.205.000				40.000.000		65.000.000	
95	419257	BNN Kabupaten Barito Kuala	572.524.000	106.000.000						9.670.000	191.195.000		14.710.000	135.949.000				40.000.000		75.000.000	
96	419258	BNN Kota Jakarta Utara	651.433.000	106.000.000						10.345.000	217.645.000	35.350.000	15.115.000	166.978.000				30.000.000		70.000.000	
97	419259	BNN Kabupaten Bojonegara	552.287.000	106.000.000						10.465.000	195.320.000	3.925.000	15.295.000	106.282.000				40.000.000		75.000.000	
98	419260	BNN Kabupaten Bone	627.319.000	106.000.000						10.510.000	204.070.000	45.225.000	14.620.000	136.894.000				40.000.000		70.000.000	
99	419261	BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	574.853.000	106.000.000						6.545.000	219.745.000		14.620.000	107.943.000				40.000.000		80.000.000	

NO	KODE	SATKER	ANGGARAN PAGN	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
100	419262	BNN Kabupaten Mena	613.343.000	106.000.000						10.465.000	187.195.000	15.750.000	14.800.000	169.133.000				40.000.000			70.000.000
101	419263	BNN KABUPATEN BOALEMO	536.787.000	106.000.000						6.625.000	185.422.000		14.350.000	142.390.000							82.000.000
102	419264	BNN Kabupaten Bima	547.817.000	106.000.000						9.685.000	216.570.000		14.665.000	135.897.000							65.000.000
103	419265	BNN Kabupaten Belu	532.117.000	106.000.000						6.705.000	215.586.000		26.880.000	99.946.000							77.000.000
104	419279	BNN Kabupaten Buru Selatan	516.143.000	106.000.000						6.585.000	199.340.000		15.385.000	120.833.000							68.000.000
105	419280	BNN Kabupaten Pulau Morotai	558.748.000	106.000.000						7.025.000	208.500.000		15.610.000	116.613.000				40.000.000			65.000.000
106	419286	BNN Kabupaten Mimika	615.089.000	106.000.000						7.345.000	205.151.000	31.400.000	15.880.000	134.313.000				50.000.000			65.000.000
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI		-																	
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	6.546.041.000											56.900.000			6.489.141.000				
109	681595	SEKRETARIAT UTAMA		-																	
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA		-																	
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	10.128.107.000	4.894.803.000																	5.233.304.000
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.412.609.000		5.261.177.000						4.151.432.000										
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMERANTASAN	56.065.118.000				9.654.609.000	10.315.536.000				2.602.229.000			10.283.569.000	3.980.043.000		10.134.131.000	9.095.001.000		
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	18.269.045.000							3.297.070.000			7.333.930.000	7.638.045.000							
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	7.093.570.000			3.000.288.000			4.093.282.000												
116	682488	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	1.861.367.000	120.700.000	65.000.000		225.000.000			66.255.000	236.602.000	167.775.000	15.115.000	292.920.000				400.000.000			272.000.000
117	682452	BNN PROVINSI BANTEN	1.427.187.000	116.000.000			125.000.000			28.710.000	239.002.000	159.430.000	14.690.000	161.355.000				400.000.000			183.000.000
118	682469	BNN PROVINSI JAWA BARAT	2.119.926.000	120.700.000	84.600.000		220.000.000			89.780.000	240.002.000	191.630.000	18.745.000	471.469.000				500.000.000			183.000.000
119	682473	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	1.979.534.000	116.000.000	69.300.000		235.000.000			52.018.000	246.002.000	251.070.000	15.470.000	201.674.000				400.000.000	210.000.000		183.000.000
120	682480	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	1.950.408.000	120.700.000	89.000.000		150.000.000			70.280.000	248.002.000	262.270.000	28.490.000	288.666.000				300.000.000	210.000.000		183.000.000
121	682494	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.333.471.000	116.000.000			110.000.000			45.008.000	246.002.000	179.610.000	14.845.000	139.006.000				300.000.000			183.000.000
122	682502	BNN PROVINSI LAMPUNG	1.568.294.000	116.000.000	65.000.000		110.000.000			50.540.000	246.002.000	102.817.000	24.780.000	320.155.000				350.000.000			183.000.000
123	682516	BNN PROVINSI BALI	2.443.713.000	120.700.000	65.000.000		210.000.000			35.350.000	249.002.000	236.226.000	15.655.000	613.780.000				505.000.000	210.000.000		183.000.000
124	682520	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.639.060.000	116.000.000	68.600.000		75.000.000			42.765.000	248.002.000	154.340.000	17.065.000	384.288.000				350.000.000			183.000.000
125	682537	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.150.786.000	116.000.000			75.000.000			25.140.000	249.002.000	103.117.000	26.880.000	122.647.000				250.000.000			183.000.000
126	682541	BNN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	2.806.734.000	116.000.000	950.000.000		60.000.000			56.505.000	259.002.000	157.315.000	14.845.000	245.067.000				765.000.000			183.000.000
127	682558	BNN PROVINSI BENGKULU	1.893.901.000	116.000.000	68.600.000		50.000.000			36.431.000	247.002.000	146.125.000	14.530.000	667.213.000				365.000.000			183.000.000
128	682562	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.020.931.000	116.000.000	94.800.000		100.000.000			45.605.000	249.002.000	200.003.000	22.375.000	579.922.000				300.000.000	210.000.000		183.000.000
129	682579	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	2.923.897.000	120.987.000	71.400.000		200.000.000			72.654.000	259.002.000	237.933.000	14.530.000	320.391.000				1.145.000.000	210.000.000		272.000.000
130	682583	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.451.293.000	116.000.000	72.600.000		50.000.000			34.770.000	259.002.000	158.715.000	16.885.000	210.321.000				350.000.000			183.000.000
131	682590	BNN PROVINSI JAMBI	1.571.421.000	116.000.000			50.000.000			30.526.000	251.002.000	138.860.000	15.610.000	286.423.000				500.000.000			183.000.000
132	682605	BNN PROVINSI RIAU	2.013.475.000	120.700.000	88.800.000		175.000.000			27.907.000	249.002.000	203.237.000	22.615.000	283.214.000				450.000.000	210.000.000		183.000.000
133	682612	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.337.019.000	116.000.000	68.600.000		50.000.000			41.008.000	249.002.000	96.771.000	16.885.000	215.753.000				300.000.000			183.000.000
134	682626	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.964.701.000	120.700.000	98.900.000		50.000.000			76.744.000	252.002.000	167.800.000	21.905.000	193.650.000				800.000.000			183.000.000
135	682630	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.725.303.000	116.000.000	66.000.000		150.000.000			36.560.000	244.002.000	148.050.000	28.460.000	253.231.000				500.000.000			183.000.000
136	682647	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.944.198.000	116.000.000	90.000.000		110.000.000			42.650.000	246.002.000	200.003.000	16.360.000	230.183.000				500.000.000	210.000.000		183.000.000
137	682651	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.106.256.000	120.700.000	90.000.000		150.000.000			31.465.000	247.002.000	205.920.000	53.030.000	325.139.000				700.000.000			183.000.000
138	682668	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.599.096.000	116.000.000	71.600.000		100.000.000			24.560.000	245.002.000	138.129.000	27.665.000	393.140.000				300.000.000			183.000.000
139	682672	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	1.518.006.000	116.000.000	86.500.000		50.000.000			49.135.000	201.002.000	139.615.000	18.145.000	274.609.000				400.000.000			183.000.000
140	682689	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.563.584.000	116.000.000	82.200.000		50.000.000			34.850.000	254.002.000	146.425.000	14.620.000	282.487.000				400.000.000			183.000.000
141	682693	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.777.327.000	120.700.000	82.800.000		50.000.000			64.760.000	250.002.000	265.280.000	14.620.000	346.165.000				400.000.000			183.000.000
142	682701	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.927.355.000	116.000.000	66.415.000		165.000.000			59.178.000	251.002.000	179.495.000	26.050.000	481.215.000				400.000.000			183.000.000
143	682715	BNN PROVINSI GORONTALO	1.424.651.000	116.000.000	88.500.000		60.000.000			30.604.000	248.002.000	131.005.000	21.250.000	246.290.000				300.000.000			183.000.000
144	682722	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	1.540.092.000	116.000.000			50.000.000			33.322.000	256.002.000	153.630.000	15.025.000	333.113.000				400.000.000			183.000.000
145	682736	BNN PROVINSI MALUKU	2.050.024.000	120.700.000	69.200.000		50.000.000			26.054.000	255.002.000	182.680.000	15.385.000	548.003.000				600.000.000			183.000.000
146	682740	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	1.626.190.000	116.000.000	71.600.000		60.000.000			39.585.000	251.002.000	130.095.000	17.075.000	257.833.000				500.000.000			183.000.000
147	682757	BNN PROVINSI PAPUA	1.749.693.000	116.000.000	82.800.000		50.000.000			25.661.000	264.002.000	147.300.000	26.830.000	254.100.000				600.000.000			183.000.000
148	682761	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	1.608.321.000	116.000.000			75.000.000			36.442.000	264.024.000	120.276.000	15.090.000	272.577.000				525.912.000			183.000.000
149	682778	BNN KABUPATEN GARUT	638.489.000	106.000.000						10.165.000	217.545.000	5.000.000	14.845.0								

NO	KODE	SATKER	ANGGARAN PAGN	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
150	682782	BNN KABUPATEN KURANGAN	573.640.000	106.000.000						10.165.000	217.545.000		14.845.000	115.085.000				35.000.000		75.000.000	
151	682799	BNN KABUPATEN CIAMIS	588.735.000	106.000.000						10.165.000	217.545.000		14.845.000	125.180.000				35.000.000		80.000.000	
152	682804	BNN KABUPATEN CIACAP	559.504.000	106.000.000						9.850.000	188.555.000	5.900.000	15.463.000	118.736.000				35.000.000		80.000.000	
153	682811	BNN KABUPATEN KENDAL	549.281.000	106.000.000						6.665.000	188.555.000	15.725.000	15.463.000	101.873.000				35.000.000		80.000.000	
154	682825	BNN KOTA MALANG	593.557.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	19.625.000	14.890.000	114.062.000				35.000.000		82.000.000	
155	682832	BNN KOTA BATU	604.124.000	106.000.000						9.985.000	211.695.000	19.625.000	14.890.000	124.929.000				35.000.000		82.000.000	
156	682846	BNN KABUPATEN TULLUNGSIJING	638.495.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	15.725.000	14.890.000	164.900.000				35.000.000		80.000.000	
157	682850	BNN KABUPATEN NGANJUK	639.104.000	106.000.000						9.985.000	211.695.000	39.250.000	14.890.000	142.284.000				35.000.000		80.000.000	
158	682867	BNN KOTA MATARAM	602.675.000	106.000.000						19.105.000	216.570.000	15.725.000	14.665.000	162.610.000						68.000.000	
159	682871	BNN KOTA LHOSEUMAWE	988.673.000	106.000.000	350.000.000					6.825.000	201.670.000		14.845.000	79.333.000				150.000.000		80.000.000	
160	682888	BNN KOTA LANGSA	585.146.000	106.000.000						6.760.000	201.670.000		14.845.000	140.871.000				35.000.000		80.000.000	
161	682892	BNN KOTA PAGARALAM	540.115.000	106.000.000						6.545.000	189.405.000		15.295.000	112.870.000				35.000.000		75.000.000	
162	682900	BNN KOTA LUBILUNGGAU	553.690.000	106.000.000						6.532.000	189.405.000		15.295.000	126.458.000				35.000.000		75.000.000	
163	682914	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	540.482.000	106.000.000						6.532.000	189.405.000		15.295.000	111.250.000				35.000.000		77.000.000	
164	682921	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	558.398.000	106.000.000						19.585.000	207.095.000		14.530.000	91.188.000				40.000.000		80.000.000	
165	682935	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	627.383.000	106.000.000						12.760.000	207.095.000		14.530.000	164.998.000				40.000.000		82.000.000	
166	682942	BNN KABUPATEN LANGKAT	829.606.000	106.000.000						13.160.000	207.095.000	33.800.000	14.530.000	335.021.000				40.000.000		80.000.000	
167	682956	BNN KOTA PAYAKUMBEH	569.653.000	106.000.000						9.685.000	189.470.000	19.625.000	14.485.000	118.388.000				35.000.000		77.000.000	
168	682960	BNN KOTA PANGKAL PINANG	566.585.000	106.000.000						6.765.000	206.145.000		14.485.000	128.190.000				40.000.000		65.000.000	
169	682977	BNN KOTA TANDILUNG PINANG	624.269.000	106.000.000						10.387.000	201.905.000		14.755.000	223.222.000						68.000.000	
170	682981	BNN KOTA PONTIANAK	595.980.000	106.000.000						12.760.000	209.415.000	15.725.000	14.710.000	162.370.000						75.000.000	
171	682998	BNN KOTA SINGKAWANG	602.572.000	106.000.000						12.760.000	209.415.000	15.725.000	14.710.000	166.362.000						77.600.000	
172	683000	BNN KOTA BANJARHARIN	614.272.000	106.000.000						9.625.000	191.195.000	11.800.000	14.710.000	165.942.000				40.000.000		75.000.000	
173	689011	BNN KOTA BANJARBARU	709.614.000	106.000.000						9.607.000	191.195.000	35.400.000	14.710.000	232.702.000				40.000.000		80.000.000	
174	689025	BNN KOTA SAMARINDA	583.468.000	106.000.000						10.465.000	192.460.000	23.600.000	14.980.000	130.963.000				40.000.000		65.000.000	
175	689032	BNN KABUPATEN MOROWALI	672.765.000	106.000.000						6.545.000	221.245.000	5.900.000	14.620.000	198.455.000				40.000.000		80.000.000	
176	689046	BNN KOTA PALOPO	632.934.000	106.000.000						10.450.000	204.070.000	3.925.000	14.620.000	183.869.000				40.000.000		70.000.000	
177	689050	BNN KABUPATEN KOLAKA	772.787.000	106.000.000						13.480.000	187.195.000	15.750.000	14.800.000	327.562.000				40.000.000		68.000.000	
178	689067	BNN KABUPATEN JAYAPURA	619.641.000	106.000.000						7.345.000	205.511.000	23.550.000	15.880.000	146.715.000				50.000.000		65.000.000	
179	689444	BNN KABUPATEN BIREUEN	951.747.000	106.000.000	350.000.000					9.805.000	201.670.000	31.400.000	14.845.000	123.027.000				35.000.000		80.000.000	
180	689451	BNN KABUPATEN ASAHAN	702.830.000	106.000.000						9.925.000	207.095.000	15.700.000	14.530.000	154.580.000				120.000.000		75.000.000	
181	689465	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	555.662.000	106.000.000						6.505.000	207.095.000	15.700.000	14.530.000	88.832.000				40.000.000		77.000.000	
182	689472	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	664.988.000	106.000.000						6.505.000	207.095.000	31.400.000	12.770.000	181.218.000				40.000.000		80.000.000	
183	689486	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	661.683.000	106.000.000						6.505.000	207.095.000	7.850.000	14.530.000	202.703.000				40.000.000		77.000.000	
184	689490	BNN KOTA PRABUMULIH	593.655.000	106.000.000						6.480.000	189.405.000		15.295.000	161.475.000				35.000.000		80.000.000	
185	689508	BNN KOTA JAMBI	529.182.000	106.000.000						6.532.000	184.065.000		14.710.000	118.875.000				35.000.000		64.000.000	
186	689512	BNN KABUPATEN BATANGHARI	539.103.000	106.000.000						6.545.000	184.065.000	3.925.000	14.710.000	120.858.000				35.000.000		68.000.000	
187	689529	BNN KOTA PEKANBARU	579.985.000	106.000.000						6.705.000	189.470.000	35.325.000	14.665.000	117.820.000				40.000.000		70.000.000	
188	689533	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	507.923.000	106.000.000						10.165.000	187.320.000		14.530.000	125.908.000						64.000.000	
189	689540	BNN KABUPATEN BELLITUNG	521.646.000	106.000.000						6.785.000	206.145.000	7.850.000	14.485.000	117.381.000						63.000.000	
190	689554	BNN KABUPATEN SIDOARJO	725.922.000	106.000.000						6.945.000	211.695.000	19.625.000	14.890.000	249.767.000				35.000.000		82.000.000	
191	689561	BNN KOTA DEPOK	669.006.000	106.000.000						6.865.000	217.545.000		14.845.000	206.751.000				35.000.000		82.000.000	
192	689575	BNN KABUPATEN KABAWANG	598.620.000	106.000.000						13.480.000	217.545.000	15.725.000	14.845.000	116.025.000				35.000.000		80.000.000	
193	689582	BNN KABUPATEN BATANG	592.938.000	106.000.000						6.665.000	188.555.000	15.725.000	15.463.000	149.530.000				35.000.000		76.000.000	
194	689596	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	561.075.000	106.000.000						6.665.000	188.555.000	15.725.000	15.463.000	113.667.000				35.000.000		80.000.000	
195	689601	BNN KOTA SURABAYA	707.093.000	106.000.000						9.985.000	211.695.000	19.625.000	14.890.000	229.898.000				35.000.000		80.000.000	
196	689618	BNN KOTA KEDIRI	640.205.000	106.000.000						6.945.000	211.695.000	39.250.000	14.890.000	144.425.000				35.000.000		82.000.000	
197	689622	BNN KABUPATEN MALANG	612.265.000	106.000.000						6.945.000	211.695.000	35.425.000	14.890.000	120.310.000				35.000.000		82.000.000	
198	689639	BNN KABUPATEN GRESIK	614.930.000	106.000.000						13.640.000	211.695.000	29.500.000	14.890.000	126.605.000				35.000.000		77.600.000	
199	689643	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	678.093.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	17.700.000	14.890.000	202.523.000				35.000.000		80.000.000	

NO	KODE	SATKER	ANGGARAN P4GN	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
200	689650	BNN KABUPATEN LUMAJANG	514.472.000	106.000.000						10.285.000	211.695.000	19.625.000	14.890.000	71.977.000							80.000.000
201	689664	BNN KABUPATEN BLITAR	611.948.000	106.000.000						6.945.000	211.695.000	51.200.000	14.745.000	108.763.000				35.000.000			77.600.000
202	689671	BNN KABUPATEN KEDIRI	571.639.000	106.000.000						6.745.000	211.695.000	19.625.000	14.890.000	100.084.000				35.000.000			77.600.000
203	689685	BNN KABUPATEN SANGGAU	551.873.000	106.000.000						6.492.000	209.415.000		14.710.000	140.256.000							75.000.000
204	689692	BNN KABUPATEN MEMPANAH	542.570.000	106.000.000						6.705.000	209.415.000		14.710.000	130.740.000							75.000.000
205	689707	BNN KABUPATEN BALANGAN	541.372.000	106.000.000						9.625.000	191.195.000		14.710.000	119.842.000				25.000.000			75.000.000
206	689711	BNN KOTA PALU	725.244.000	106.000.000						9.685.000	219.745.000	39.250.000	14.620.000	213.944.000				40.000.000			82.000.000
207	689728	BNN KABUPATEN DONGGALA	632.465.000	106.000.000						6.545.000	218.745.000	9.825.000	14.620.000	154.730.000				40.000.000			82.000.000
208	689732	BNN KABUPATEN POSO	655.533.000	106.000.000						9.685.000	224.745.000	25.550.000	14.620.000	152.933.000				40.000.000			82.000.000
209	689749	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	648.382.000	106.000.000						9.630.000	224.745.000		14.620.000	178.387.000				40.000.000			75.000.000
210	689753	BNN KOTA KENDARI	768.040.000	106.000.000						10.165.000	187.195.000	7.875.000	14.800.000	332.005.000				40.000.000			70.000.000
211	689760	BNN KOTA BITUNG	577.748.000	106.000.000						13.880.000	195.320.000	3.925.000	15.295.000	128.328.000				40.000.000			75.000.000
212	689774	BNN KOTA MANADO	621.410.000	106.000.000						20.065.000	195.320.000	35.400.000	15.295.000	132.330.000				40.000.000			77.000.000
213	689781	BNN KOTA GORONTALO	529.806.000	106.000.000						9.850.000	185.422.000		14.350.000	134.184.000							80.000.000
214	689795	BNN KABUPATEN BONE BOLANGI	543.383.000	106.000.000						9.790.000	185.422.000		14.350.000	147.821.000							80.000.000
215	689800	BNN KOTA DENPASAR	601.934.000	106.000.000						9.815.000	217.365.000		14.755.000	136.999.000				35.000.000			82.000.000
216	689817	BNN KABUPATEN BADUNG	807.985.000	106.000.000						6.653.000	217.365.000	39.250.000	14.755.000	308.962.000				35.000.000			80.000.000
217	689821	BNN KABUPATEN GIANYAR	686.327.000	106.000.000						6.865.000	217.365.000	45.225.000	14.755.000	184.117.000				35.000.000			77.000.000
218	689838	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	553.330.000	106.000.000						9.670.000	216.570.000		14.665.000	141.425.000							65.000.000
219	689842	BNN KOTA KUPANG	518.713.000	106.000.000						6.905.000	215.586.000		14.980.000	100.242.000							75.000.000
220	689859	BNN KABUPATEN ROTTE NDAO	515.166.000	106.000.000						6.545.000	215.586.000		14.980.000	97.055.000							75.000.000
221	689863	BNN KOTA TUAL	765.626.000	106.000.000						6.785.000	199.340.000	23.575.000	15.385.000	309.541.000				40.000.000			65.000.000
222	689870	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	525.036.000	106.000.000						10.390.000	208.500.000		15.610.000	114.536.000							70.000.000
223	689884	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	521.875.000	106.000.000						7.025.000	208.500.000		15.610.000	119.740.000							65.000.000
		JUMLAH	284.516.935.000	27.224.090.000	9.278.992.000	3.000.288.000	13.254.609.000	10.315.536.000	4.093.282.000	6.336.698.000	47.692.932.000	10.319.614.000	10.589.027.000	44.019.946.000	10.283.569.000	3.980.043.000	14.314.194.000	30.840.043.000	10.565.001.000	24.483.304.000	3.925.767.000